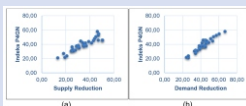


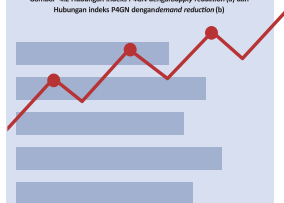
INDEKS P4GN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 2020



Gambar 4.2 menunjukkan hubungan antara indeks P4GN dengan dimensi supply reduction dan demand reduction yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan positif, yaitu ketika indeks supply reduction dan demand reduction meningkat, maka indeks P4GN juga meningkat.



Gambar 4.2 Hubungan indeks P4GN dengan supply reduction (a) dan hubungan indeks P4GN dengan demand reduction (b)





INDEKS

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TAHUN 2020



PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2021

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020/ Agus Irianto..[et.al]. – Jakarta : Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2021.
112 hlm. ; 23 cm.

ISBN : 978-623-93775-3-3

1. Narkotika, Penyalahgunaan.

364.133 65

Tim Penyusun :

Pengarah	: Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H., Ph.D : Achmad Prasetyo, B.St., S.Si., M.M. : Purwa Kurnia Sucahya, S.KM, M.Si.
Penanggung Jawab	: Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.
Ketua	: Sri Haryanti, S.Sos., M.Si
Anggota	: Anugerah Karta Monika, S.Si., M.E. : Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si., M.Sc., Ph.D. : Mona Lisa, S.KM, M.KM. : Enrika Rahayu Setyani, S.Gz. : Armita Eki Indahsari, S.Si. : Sri Lestari, S.Kom., M.Si. : Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si. : Erma Antasari, S.Si. : Novita Sari, S.Sos., M.H. : Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.
Desain Cover	: Tri Sugiharto, S.Kom
Desain Isi	: Indoyanu Muhamad

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit :

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telp. (021) 80871566, 80871567
Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871593
Email : puslitdatin@bnn.go.id
Call Center : 184
SMS Center : 081221675675
Website : www.bnn.go.id



Penanganan permasalahan narkoba merupakan salah satu program dan kegiatan yang dilaksanakan hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan narkoba di Indonesia mencakup dua masalah besar yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap. Upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat diarahkan untuk memotong akar masalah keduanya. Melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara masif dilakukan untuk menangani permasalahan narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah *supply reduction* dan *demand reduction*.

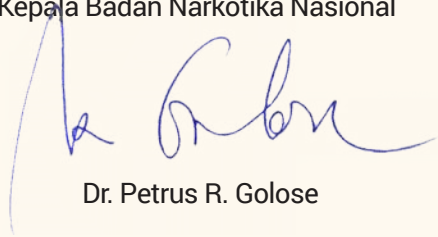
Sejauh ini, keberhasilan kinerja P4GN diukur secara statistik melalui pengukuran laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pengukuran tersebut tentunya hanya dapat menggambarkan keberhasilan kinerja program P4GN di tingkat hulu saja. Untuk itu, BNN bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta pada tahun 2020 melakukan kajian penyusunan Indeks P4GN.

Buku **“Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020”** berisi hasil kajian penyusunan Indeks P4GN berdasarkan pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*. Perhitungan Indeks P4GN yang dilakukan menggunakan standar statistika dalam pengukuran indeks kinerja yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pembentukan variabel dan indikator Indeks P4GN dilakukan dengan melibatkan perwakilan satuan kerja BNN dan praktisi. Hasil kajian ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja program P4GN.

Kata Sambutan

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan alternatif gambaran pengukuran indeks keberhasilan penanganan narkoba di Indonesia.

Jakarta, Juli 2021
Kepala Badan Narkotika Nasional



Dr. Petrus R. Golose

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat serta karunia-Nya yang sangat besar hingga kami dapat menyelesaikan Buku Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2020 tepat waktu. Buku ini merupakan hasil Kajian Penyusunan Indeks P4GN kerja sama antara Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta. Kajian ini dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan satuan kerja BNN, konsultan, peneliti Universitas Indonesia dan mitra lokal BNNP di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Kajian ini merupakan alternatif upaya pengukuran kondisi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2020, sehingga diharapkan Indeks P4GN dapat menjadi alternatif ukuran keberhasilan kinerja yang selama ini belum terukur secara komprehensif. Pengembangan konsep dan definisi variabel dan indikator pembentuk Indeks P4GN dilakukan melalui pengumpulan data rutin dan diskusi kelompok terarah dengan seluruh bidang tugas di BNN pusat, seluruh bidang BNNP, Kejaksaan Tinggi, Direktorat Narkoba Polda, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Badan Kesbangpol, Bea Cukai, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian Kajian Penyusunan Indeks P4GN. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi positif dan memberikan manfaat dalam alternatif perbaikan dan penyempurnaan program dan kebijakan P4GN di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2021

Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN

+

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2019 sebesar 1.80 persen atau 3,42 juta orang dalam rentang usia 15-64 tahun pernah menyalahgunakan setahun terakhir. Angka prevalensi tersebut menunjukkan penurunan daripada angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2011 sebesar 2.23 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan efektif.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia dilakukan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dicanangkan sejak tahun 2012. Program P4GN dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilaksanakan bersama *stakeholder* dan komponen masyarakat. P4GN sebagai program prioritas harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Pengukuran keberhasilan kinerja program P4GN sampai saat ini hanya dilakukan melalui perhitungan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba hanya menggambarkan kondisi keberhasilan P4GN di tingkat hulu, untuk itu diperlukan pengukuran yang lebih dapat memberikan gambaran menyeluruh.

Kondisi tersebut mendorong BNN sebagai *vocal point* pelaksanaan program P4GN untuk menggagas sebuah alternatif pengukuran keberhasilan kinerja program P4GN. Terkait dengan hal tersebut, tahun 2020 BNN bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Kajian Penyusunan Indeks P4GN. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan perhitungan dan angka Indeks P4GN pada tahun 2020.

Kajian penyusunan Indeks P4GN dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu antara dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Dimensi *demand reduction* berorientasi pada upaya perlindungan dan penguatan ketahanan personal maupun komunal masyarakat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba serta upaya pemulihan adiksi atau kecanduan narkoba. Dimensi *supply reduction* berorientasi menekan perkembangan sistem mata

rantai peredaran gelap narkoba mulai dari produksi, peredaran (penyelundupan/ pengiriman/ distribusi) dan pemasaran/penjualan ke pengguna akhir (*end user*). Kedua dimensi tersebut digali berdasarkan perspektif *input*, proses, dan *output* melalui bidang kegiatan kedeputian BNN.

Kajian tersebut dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder hasil kinerja BNN tahun 2019, kemudian dilakukan pembobotan dan normalisasi data sebelum perhitungan indeks dilakukan. Diskusi kelompok terarah dengan unsur BNNP dan 9 (sembilan) instansi terkait pun dilakukan di 8 (delapan) provinsi terpilih guna mendapatkan gambaran kesiapan data pada perhitungan Indeks P4GN selanjutnya.

Kajian ini menghasilkan temuan penting bahwa perhitungan Indeks P4GN pada tahun 2020 merupakan langkah awal dan masih sangat mendasar sehingga diperlukan diskusi panjang terkait dengan indikator pembentuk indeks P4GN ke depan. Hasil perhitungan Indeks P4GN tahun 2020 masuk dalam klasifikasi “Cukup Efektif”.

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Manfaat	5
D. Keterbatasan	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pendekatan <i>Supply Reduction</i> and <i>Demand Reduction</i> dalam Penanggulangan Masalah Narkoba	9
1) <i>Supply Reduction</i>	10
2) <i>Demand Reduction</i>	13
B. Metode Penyusunan Indeks Komposit Menurut OECD	23
3. METODE	25
A. Desain Penelitian	27
B. Sumber Data	27
C. Urgensi Akademis	28
D. Metode Perhitungan Indeks	28
E. <i>Focus Group Discussion</i>	38
4. HASIL PERHITUNGAN INDEKS	41
A. Indikator Pembentuk Indeks P4GN	43
B. Nilai Indeks P4GN	47
C. Visualisasi Indeks P4GN Tingkat Nasional dan Provinsi	52
D. Hubungan antara Indikator dengan Indeks P4GN	54
E. Tantangan dalam Penyusunan Indeks P4GN	64

5. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	75
GLOSARIUM	78
DAFTAR NAMA PENELITI	80
LAMPIRAN	81
EPILOG	97

Daftar Gambar

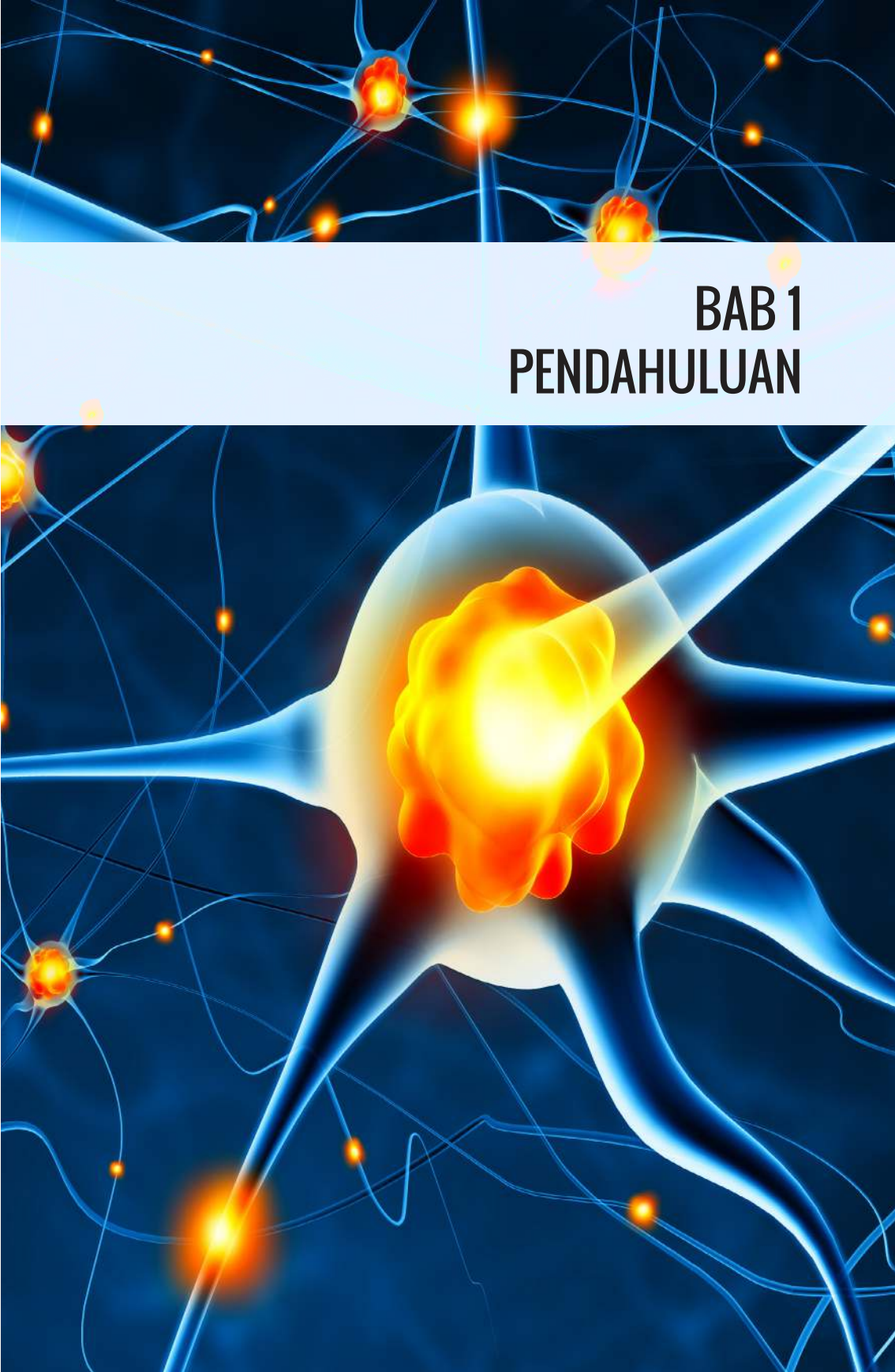
Gambar 1.	Hierarki Kegiatan <i>Demand Reduction</i>	15
Gambar 2.	Kerangka Pikir Pembentukan Indeks P4GN	29
Gambar 3.	Dekomposisi Indeks P4GN	50
Gambar 4.	Hubungan Indeks P4GN dengan <i>Supply Reduction</i> (a) dan Hubungan Indeks P4GN dengan <i>Demand Reduction</i> (b)	51
Gambar 5.	Indeks P4GN Menurut Provinsi Tahun 2020	53
Gambar 6.	Persentase Provinsi Berdasarkan Nilai dan Klasifikasi Indeks	54
Gambar 7.	Hubungan Indeks P4GN dengan Persentase Realisasi Anggaran	55
Gambar 8.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Aparat Pemberantasan	56
Gambar 9.	Hubungan Indeks P4GN dengan Berkas Perkara Kasus Peredaran Narkoba	57
Gambar 10.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Tersangka Kasus Tindak Pidana	58
Gambar 11.	Persentase Nilai Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika	59
Gambar 12.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi	60
Gambar 13.	Hubungan Indeks P4GN dengan Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	61
Gambar 14.	Hubungan Indeks P4GN dengan Kegiatan Bidang Advokasi	62
Gambar 15.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Penggiat Anti Narkoba	63
Gambar 16.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Titik Kawasan Rawan Narkoba	64
Gambar 17.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Peserta Kegiatan Program Pelatihan Pemberdayaan Alternatif	65
Gambar 18.	Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Fasilitas Rehabilitasi yang Ada Keterlibatan BNN dalam Pengelolaannya	66
Gambar 19.	Hubungan Indeks P4GN dengan Penilaian Standar Pelayanan Minimal pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah (BNNP)	67

Daftar Tabel

Tabel 1.	Kelebihan dan Kekurangan Indeks Komposit	24
Tabel 2.	Jumlah Indikator Pembentuk Indeks	43
Tabel 3.	Indeks P4GN Menurut Variabel dan Dimensi	47
Tabel 4.	Dekomposisi Indeks P4GN 2019 Menurut Provinsi	48
Tabel 5.	Perbandingan Indeks P4GN dengan Indeks Ketahanan Nasional dan <i>Organized Crime Index Africa</i>	52

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Tabel Definisi Operasional	82
Lampiran 2.	Tabel Hasil Uji Validitas	87
Lampiran 3.	Tabel Pengolahan Data Indeks	89
Lampiran 4.	Tabel Perhitungan Indeks	96



BAB 1

PENDAHULUAN



Generasi
Muda
.... Tolak
Narkoba

ASI PENERUS NEGERI
..... RAIH PRESTASI
..... HALUSINASI YANG TAK BERARTI!



A. Latar Belakang

Penanganan permasalahan narkoba harus dilaksanakan berimbang dan komprehensif antara dimensi *demand reduction* dan *supply reduction*. Penanganan dimensi *demand reduction* berorientasi pada upaya perlindungan dan penguatan ketahanan masyarakat baik secara personal maupun komunal terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mencakup upaya pemulihan adiksi atau kecanduan narkoba. Sementara penanganan pada dimensi *supply reduction* berorientasi pada penekanan perkembangan mata rantai peredaran gelap narkoba yang terdiri dari produksi, peredaran (penyelundupan/ pengiriman/ distribusi) dan pemasaran/ penjualan ke pengguna akhir (*end user*).

Permasalahan narkoba merupakan ancaman kehidupan bangsa dan negara harus ditangani secara berkelanjutan melalui berbagai intervensi program penanganan permasalahan narkoba dengan berbagai pendekatan atau multidisipliner. Upaya tersebut dilakukan dan dikoordinasikan oleh BNN selaku *vocal point* dengan melibatkan *stakeholder* yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan unsur masyarakat. Penanganan permasalahan narkoba dalam struktur perencanaan pembangunan nasional disebut dengan Program P4GN. P4GN merupakan program prioritas pembangunan manusia yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pertanggungjawaban publik terkait kinerja program P4GN memerlukan adanya indikator sebagai ukuran capaian intervensi program untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Selama ini keberhasilan program P4GN hanya diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka prevalensi

penyalahgunaan narkoba menurut hemat peneliti hanya mampu menggambarkan kondisi keterpaparan penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia dan kurun waktu tertentu. Potret yang diberikan terkait dengan angka prevalensi adalah gambaran dampak (*impact*) program P4GN bersifat jangka panjang. Pengukuran keberhasilan program atau kebijakan bukan hanya membutuhkan indikator bersifat jangka panjang, tetapi juga membutuhkan indikator yang dapat diukur perubahannya setiap tahun dan dilakukan secara rutin. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tidak cukup mampu memberikan gambaran atau mengidentifikasi faktor dan hubungan atau pengaruh secara langsung dari berbagai intervensi program P4GN terhadap perubahan suatu kondisi. Untuk itu, BNN perlu membangun instrumen pengukuran kinerja program P4GN berdasarkan landasan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat memotret, meninjau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program P4GN secara tepat.

Pelaksanaan penyusunan indeks P4GN dilakukan dalam upaya mencari alternatif pengukuran keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. Kajian ini digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan *leading sector* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Selama ini indikator yang digunakan lebih banyak memotret angka keterpaparan narkoba atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil survei ataupun angka keberhasilan dalam mengungkap berbagai penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

B. Tujuan

Penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bertujuan untuk:

1. Menyusun alat ukur indeks P4GN yang mencakup dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*.
2. Menyusun rumusan perhitungan indeks komposit P4GN yang mencakup dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*.
3. Mengetahui nilai indeks P4GN pada tahun 2020 dengan basis data tahun 2019.

C. Manfaat

Kajian penyusunan Indeks P4GN Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Alternatif pengukuran keberhasilan pelaksanaan program P4GN di Indonesia.
2. Bahan rekomendasi dalam bentuk pemetaan hasil capaian program dan kegiatan P4GN sebagai bahan evaluasi guna perbaikan atau penyempurnaan kebijakan program dan kegiatan P4GN menjadi lebih efektif dan efisien.

D. Keterbatasan

Kegiatan penelitian termasuk kajian biasanya dilakukan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda, sehingga tidak ada satupun penelitian atau kajian yang tidak memiliki keterbatasan. Kajian ini memiliki dua keterbatasan data yaitu keterbatasan data pelaksanaan kegiatan P4GN dan keterbatasan data target pencapaian kinerja P4GN.

1. Keterbatasan Data Pelaksanaan Kegiatan P4GN

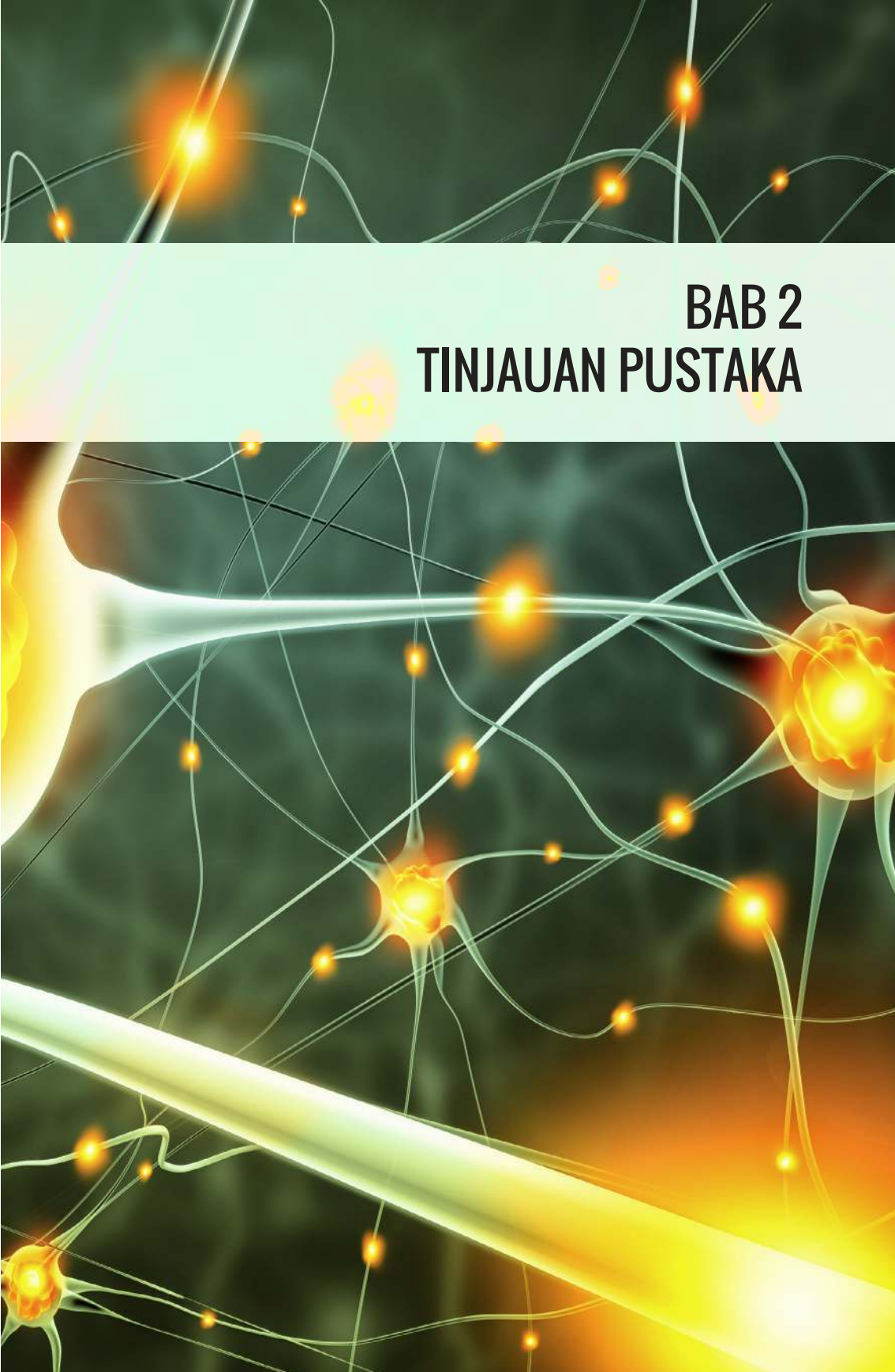
P4GN merupakan program penanggulangan masalah narkoba di Indonesia mulai dari hulu sampai dengan hilir. Program P4GN dilaksanakan oleh BNN bersama dengan *stakeholder*. Keterlibatan kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan mulai diatur pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 dan diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Kajian penyusunan Indeks P4GN Tahun 2020 menggunakan data pelaksanaan kegiatan P4GN yang berasal dari BNN dan BNNP.

Tidak semua BNNP memiliki kantor BNNK yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 173 kabupaten kota yang terdapat kantor BNNK, sehingga intervensi BNNP di setiap provinsi berbeda-beda karena

dukungan kantor BNNK yang belum lengkap. Hal ini menyebabkan cakupan intervensi yang dilakukan BNNP berpengaruh terhadap nilai indikator yang digunakan, terutama untuk penghitungan indeks P4GN di tingkat provinsi.

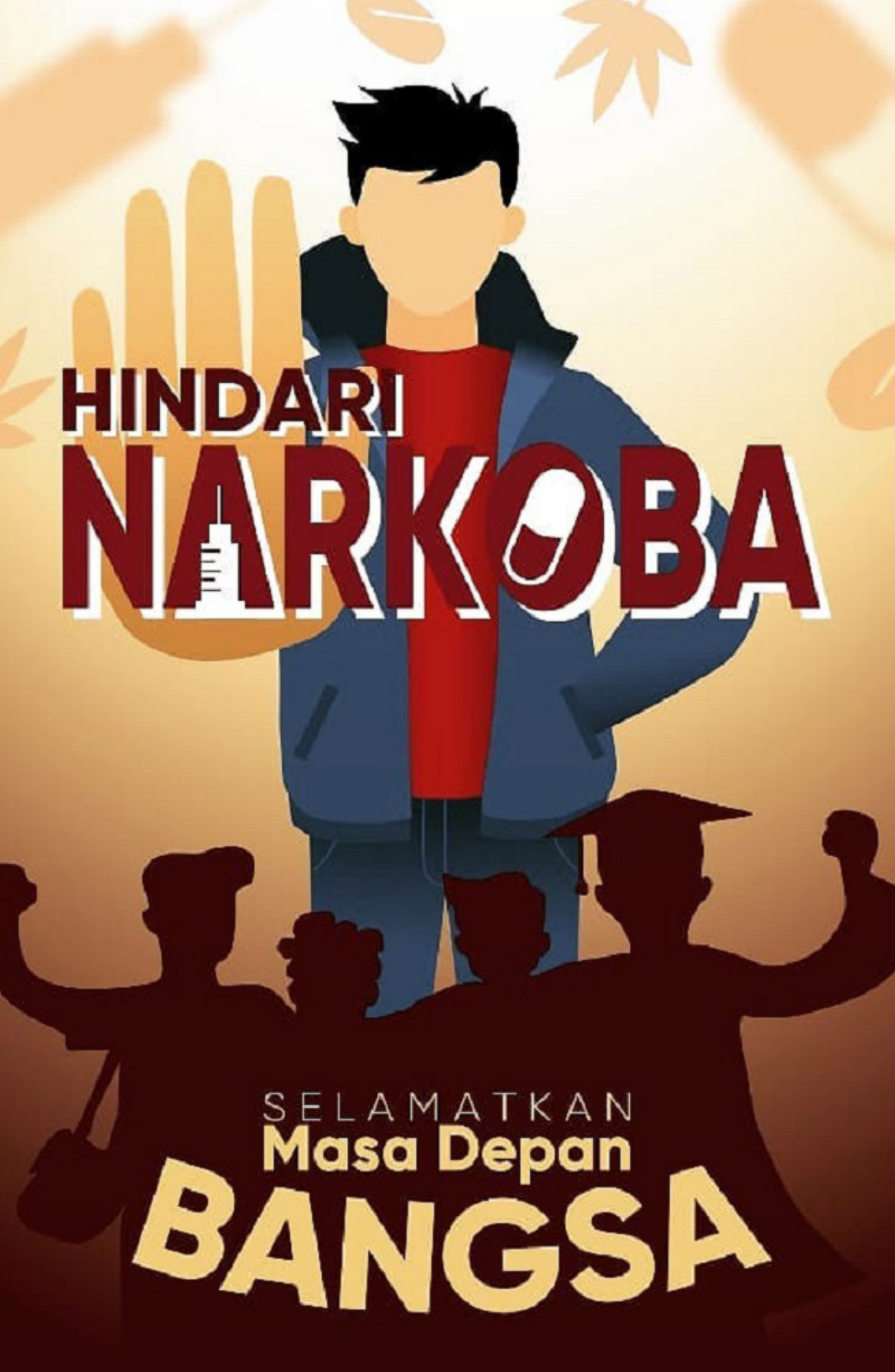
2. Keterbatasan Data Target Pencapaian Kinerja P4GN

Nilai satuan setiap indikator berbeda satu sama lain, sehingga untuk mengurangi kemungkinan bias yang disebabkan oleh perbedaan tersebut dilakukan normalisasi data. Normalisasi data bertujuan untuk membuat nilai indikator menjadi sebanding. Data target minimum dan maksimum dari pencapaian kinerja setiap indikator dibutuhkan untuk melakukan normalisasi. Proses normalisasi pada perhitungan indeks tahun 2020 menggunakan metode *minmax* sehingga data target capaian kinerja diperlukan untuk melakukan proses tersebut, namun pada saat pelaksanaan kajian ini data target capaian kinerja pusat dan provinsi belum tersedia lengkap.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



**HINDARI
NARKOBA**

SELAMATKAN
Masa Depan
BANGSA

A. Pendekatan *Supply Reduction* and *Demand Reduction* Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba

Penanggulangan masalah narkoba di dunia memiliki banyak pendekatan mengingat kompleksitas masalah yang terjadi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan di dunia internasional tidak terkecuali di Indonesia adalah pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*. Pendekatan ini memfokuskan pada pengurangan persediaan narkoba dan pengurangan permintaan narkoba. *Supply reduction* dan *demand reduction* merupakan dua kebijakan yang banyak digunakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba di negara-negara Barat (Cogans, 2006; *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), 2008; Hakkarainen, Lagerstedt, dan Tuukka, 2007; Hanson, Venturelli, & Fleckenstein, 2004). Kebijakan *supply reduction* berfokus pada penegakan hukum untuk mengurangi produksi, peredaran dan penjualan narkoba (Bjarnason, 2010). Sementara *demand reduction* menekankan pentingnya upaya kesehatan masyarakat, pencegahan spesifik, program perawatan untuk mengurangi inisiasi dan persistensi penggunaan narkoba.

Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi dengan seluruh tim peneliti dan perwakilan satuan kerja maka indeks P4GN Tahun 2020 dibangun berdasarkan kerangka teoritis yang berlaku secara internasional dengan menggunakan pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*. Pendekatan tersebut dikaitkan dengan dimensi input, proses, dan hasil pelaksanaan Program P4GN di Indonesia.

1. *Supply Reduction*

Supply reduction dalam penanganan narkoba adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengurangi persediaan narkoba atau peredaran narkoba di masyarakat (Hanso, Venturelli, Fleckenstein, 2018). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pentz et al, 1996 bahwa tujuan pendekatan *supply reduction* dalam penanganan penyalahgunaan narkoba adalah untuk mengontrol atau mengurangi akses terhadap narkoba. Secara lebih spesifik Buxton, 2015 mengatakan strategi *supply reduction* bertujuan untuk mencegah perdagangan narkoba mencapai pasar konsumen yang ada, atau menciptakan pasar baru dengan memotong sumber narkoba dan memutus mata rantai distribusinya.

Tindakan yang termasuk dalam *supply reduction* meliputi pengaturan produksi dan distribusi narkoba melalui proses penegakan hukum yang bersifat pengurangan, dan pelarangan penyalahgunaan narkoba. Termasuk didalamnya adalah *interdiction* berupa pemusnahan ladang ganja sebagai salah satu proses penyediaan bahan baku narkoba. Berikut ini beberapa program intervensi yang merupakan bagian dari pendekatan *supply reduction*:

a. Pengurangan Produksi

Untuk memaksimalkan upaya *supply reduction*, beberapa program difokuskan pada pemberantasan sumber narkoba, termasuk situs budidaya tanaman narkotika ilegal, organisasi perdagangan obat di tingkat regional, nasional, atau tingkat pedagang jalanan. Pemberantasan tanaman narkotika yang berkelanjutan, pembangunan/ pemberdayaan alternatif, peraturan obat-obatan yang ketat, pengawasan dan larangan prekursor dilakukan bersama dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang didukung oleh komitmen tinggi pemerintah, menghasilkan pengurangan perdagangan kokain dan kimia prekursor yang signifikan. Selain itu, terjadi peningkatan pembongkaran organisasi kriminal dan penyitaan aset terkait dengan narkoba (INCB, 2004). Namun, Indonesia juga harus belajar dari kesulitan Republik Ceko dalam memberantas produsen obat-obatan terlarang di negaranya karena produksi bersifat desentralisasi dan menggunakan laboratorium kecil sehingga sulit dilacak (Kilmer & Hoorens, 2010).

Pemberantasan lahan tanaman narkoba dikatakan dapat meningkatkan potensi pembangunan dan perdamaian negara dengan mengurangi kapasitas pemberontak dan kekerasan serta pelaku kriminal terkait Narkoba. Hal ini dikarenakan perdagangan kokain dan heroin berhubungan dengan tindak kekerasan, hasil perdagangan jenis narkoba tersebut digunakan untuk membiayai tindakan pemberontakan dan terorisme (Buxton, 2015).

Supply reduction akan berhasil jika seluruh negara bekerja sama untuk memberantas narkoba. Faktanya beberapa negara yang merupakan produsen besar atau petani obat-obatan terlarang seperti Rusia, Afghanistan, Myanmar, dan Kolombia memiliki masalah ketidakstabilan politik, kemiskinan dan korupsi yang menghambat upaya *supply reduction* di negara-negara tersebut (Institute Burnet, n.d.).

b. Pemutusan Distribusi

Narkoba hanya diproduksi oleh beberapa negara, namun perdagangan narkoba mempengaruhi sosial dan ekonomi di banyak negara, dan penyalahgunaan serta peredaran gelapnya tersebar luas di semua negara di dunia (Melis & Nougier, 2012). Produsen dan importir obat-obatan terlarang akan kehilangan banyak produk mereka akibat penyitaan sehingga mereka akan menyimpan produk untuk stok. Peningkatan aktivitas ini dapat membuat produsen atau distributor menaikkan harga jual narkoba dan bisa membuat penurunan penggunaan narkoba (Wan et.al., 2014).

Setiap negara memiliki kebijakan dan program khusus dalam menanggulangi masalah narkoba, berikut beberapa tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam upaya pengurangan ketersediaan obat-obatan terlarang (*Office of National Drug Control Policy*, 2020):

- 1) Mengganggu, membongkar, dan menjatuhkan pengedar narkoba dan rantai distribusinya,
- 2) Bekerja sama dengan partner internasional dalam penanggulangan kasus narkoba,
- 3) Memberantas perdagangan narkoba melalui internet,

- 4) Fokus terhadap upaya pemerintah untuk melawan pengiriman narkoba melalui surat dan jaringan pengiriman melalui jasa ekspedisi,
- 5) Melarang pengiriman narkoba melintasi perbatasan darat dan jalur masuk menuju Amerika Serikat,
- 6) Mengganggu dan membongkar infrastruktur produksi narkoba,
- 7) Memanfaatkan kapabilitas dari program satuan tugas multi lembaga,
- 8) Mengganggu aktivitas keuangan pengedar narkoba dengan menyita seluruh aset; dan
- 9) Meningkatkan kapasitas penegak hukum.

c. Perampasan Aset

Penyitaan aset pengedar beserta uang tunai yang terkait dalam transaksi narkoba dapat mempengaruhi jumlah pasokan narkoba (dalam hal ini narkoba jenis *Amphetamine*) di pasar, meskipun hal itu bergantung pada seberapa besar penyitaan dan pola jaringan rantai distribusi penyitaan tersebut dilakukan. Penyitaan dan penangkapan tersebut pun dapat memberikan informasi penting kepada intelijen.

The Collaborative Harmonised Amphetamine Initiative (CHAIN), yang dibentuk oleh 5 negara anggota, menggunakan uji forensik untuk membantu identifikasi hubungan antara penyitaan dengan kelompok pedagang Narkoba (Kilmer and Hoorens, 2010). Penyitaan dan penegakan hukum atas obat-obatan terlarang memiliki tujuan yaitu :

- 1) Meningkatkan efek jera dari perdagangan dan distribusi narkoba (kehilangan produk dan identifikasi pihak terkait yang akan dituntut),
- 2) Membebankan biaya pada pemasok yang diyakini dapat meningkatkan harga, sehingga dapat mengurangi permintaan akan narkoba,
- 3) Menghasilkan informasi tentang distribusi geografis narkoba sampai ke pasar serta para pelakunya, dan
- 4) Sebagai ukuran kinerja lembaga penegak hukum.

Penurunan angka penyitaan dari waktu ke waktu dapat terjadi karena lembaga penegak hukum bekerja dengan lebih efektif sehingga menghalangi pemasok dari perdagangan obat, atau bisa juga karena lembaga penegak hukum menjadi kurang efektif dan tidak mampu mencegah pengiriman narkoba dengan jumlah yang sama. Menurut Reuter (1995) hal ini bergantung pada tiga faktor yaitu jumlah yang dikirim, keterampilan petugas interdiksi, dan perawatan yang dilakukan oleh penyelundup (Kilmer and Horrens, 2010). Contohnya ketika penyitaan dalam jumlah besar terjadi dalam satu peristiwa, kinerja penegak hukum dikatakan efektif karena dapat menghambat perdagangan narkoba.

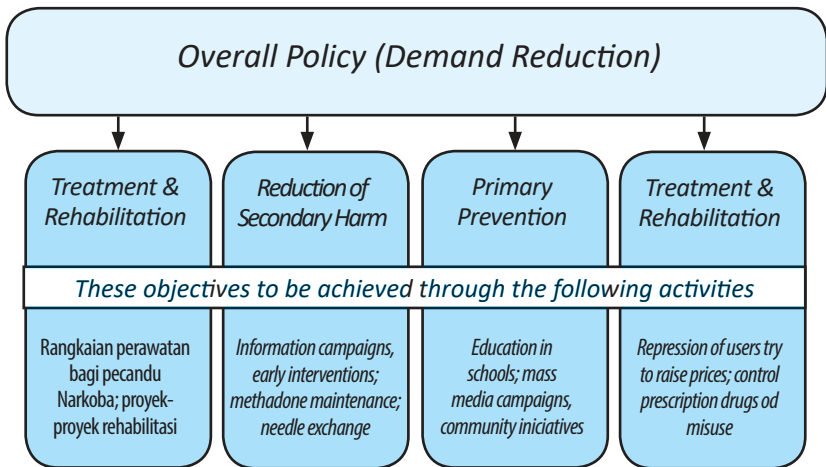
Mempelajari lebih dalam jumlah penyitaan berbagai jenis narkoba dapat membantu penegak hukum dalam memahami kapan rute perdagangan dilakukan atau kemungkinan pergerakan pelaku perdagangan tertentu ke lini bisnis baru. Informasi tentang penyitaan di lokasi spesifik selama kurun waktu tertentu memberikan informasi tentang kepentingan relatif dari suatu rute dan apakah ada 'musim' tertentu dalam distribusi narkoba pada rute tersebut. Namun sayangnya, belum ada protokol umum yang digunakan untuk pelaporan data penyitaan tersebut di negara-negara Eropa (Kilmer and Horrens, 2010).

2. Demand Reduction

Demand reduction dalam kerangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba meliputi semua tindakan yang bertujuan akhir mengurangi permintaan narkoba seperti program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan anak dan remaja serta kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan *values, attitudes, skills*, dan *behaviour* sehingga mendorong resistensi terhadap penyalahgunaan narkoba (Hanso, Venturelli, Fleckenstein, 2018). Hasil penelitian Caulkins et al. (2005) menggambarkan bahwa intervensi penanganan Narkoba dengan pendekatan *supply reduction* dapat bekerja efektif jika program yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan *demand reduction* (Ciccarone, 2019).

Dampak dari masing-masing faktor *supply* dan *demand* adalah relatif, namun tidak diragukan bahwa *demand* merupakan faktor penentu. Penelitian Wilson (1990) mengatakan bahwa pengurangan signifikan pada penyalah guna narkoba hanya akan terjadi dengan pendekatan pengurangan *demand* (Reuband, 1998). Tujuan dari *demand reduction* adalah untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba, mengobati kecanduan, dan mengurangi akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba (INCB, 2004). Hal ini sejalan dengan (Buxton, 2015) yang mengatakan bahwa *demand reduction* berfokus pada pengurangan partisipasi konsumen di perdagangan narkoba dengan strategi dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan program dukungan bagi penyalah guna yang mengalami ketergantungan. Pendekatan *demand reduction* artinya mencegah orang dari keinginan untuk dan menggunakan obat-obatan terlarang (Institute Burnet, n.d.).

Hartnoll (1990) membuat hierarki aktifitas *demand reduction* seperti pada Gambar 1. Hierarki tersebut menggambarkan empat tujuan umum yang ingin dicapai melalui *demand reduction*, yaitu: perawatan dan rehabilitasi, pengurangan bahaya sekunder, pencegahan primer, dan pengendalian penggunaan dan ketersediaan narkoba. Kegiatan yang bisa dilakukan terkait perawatan dan rehabilitasi adalah penyediaan rangkaian perawatan (rehabilitasi) sesuai dengan tingkatan kecanduan, dan membuat proyek rehabilitasi (pusat rehabilitasi). Pengurangan bahaya sekunder dicapai dengan penyebarluasan informasi mengenai bahaya narkoba, melakukan intervensi dini, penggunaan metadon sebagai substitusi zat, dan penggunaan jarum suntik. Kegiatan dalam pencegahan utama meliputi pendidikan di sekolah tentang bahaya narkoba, kampanye di media massa, dan menggerakkan komunitas untuk lebih peduli terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekitar.



Gambar 1. Hierarki Kegiatan Demand Reduction

Sumber: Hartnoli (1990)

Menurut Bjarnason (2010), *demand reduction* pada tindakan pencegahan bahaya narkoba dapat dibedakan berdasarkan cakupannya, yaitu populasi secara umum dan populasi khusus seperti sekolah, orang tua, dan tempat kerja. Saxe (2006) menekankan pentingnya peranan komunitas dalam mengurangi permintaan narkoba. Beberapa program koalisi komunitas ini berhasil dalam skala besar, meskipun sebagian besar program berhasil adalah berskala kecil, atau memiliki fokus tujuan cukup sempit seperti mengurangi konsumsi minuman beralkohol tetapi tidak menyasar penyalahgunaan narkoba, atau hanya berfokus pada sub-grup seperti remaja (Holder et al., 2000; Wagenaar, Murray, & Toomey, 2000).

Berikut ini beberapa program intervensi yang merupakan bagian dari pendekatan *demand reduction*:

a. Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal

Sangat jelas dikatakan bahwa investasi yang paling berharga dalam penanganan penyalahgunaan narkoba adalah program yang dapat menghentikan anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba untuk pertama kalinya dan mencegah

penyalah guna yang baru meningkat menjadi penyalah guna yang mengalami ketergantungan (kecanduan) narkoba (*Global Commission on Drug Policy*, 2011). Secara umum, pendekatan *demand reduction* dalam penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu untuk menolak tawaran untuk menggunakan narkoba melalui edukasi dan program pelatihan perubahan perilaku (Pentz et al., 1996). Individu dengan faktor risiko yang signifikan ditambah mereka yang memiliki kesulitan di keluarga, *peer group*, sosial, lingkungan dan psikologis lebih rentan menjadi penyalah guna narkoba baru (INCB, 2004). Semakin baik pemahaman anak dan remaja mengenai risiko penyalahgunaan narkoba, semakin mereka memilih untuk tidak menggunakannya (*Office of National Drug Control Policy*, 2007).

Model sederhana *demand reduction* salah satunya adalah program yang bertujuan untuk memutus hubungan antara penawaran narkoba dengan penyalah guna. Program intervensi tersebut diasumsikan dapat meningkatkan resistensi calon pengguna narkoba. Hansen (1992) mengutarakan fokus utama strategi *demand reduction* pada *training* yang dilakukan kepada anak dan remaja adalah untuk mengajarkan bagaimana mereka menyadari risiko dan pengaruh penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mereka menghindarinya. Beberapa faktor risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja adalah pengaruh lingkungan di sekolah, keluarga, media dan komunitas; mulai dari pengaruh langsung berupa akses kepada narkoba hingga pengaruh tidak langsung berupa contoh penyalahgunaan narkoba, norma sosial untuk menggunakan narkoba, kurangnya komunikasi dan ikatan sosial, serta penolakan terhadap individu ataupun kelompok (Pentz et al., 1996). Ada banyak program yang direncanakan untuk kelompok target tertentu, namun program yang berfokus pada kemampuan sosial dan pengaruh teman sebaya memiliki dampak positif terhadap usia pengguna yang mencoba pertama kali dan dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba (*Global Commission on Drug Policy*, 2011).

Saat ini, konten program pelatihan mengalami perubahan dari yang sebelumnya mengajarkan apa dan bagaimana narkoba disalahgunakan menjadi pelatihan bagaimana kondisi dan kemampuan (*skill*) bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba. Metode program yang dilakukan meliputi *active social learning*, *role play*, diskusi, dan pembentukan *peer-educator* dari siswa yang didampingi oleh guru. Penelitian jangka panjang mengenai program berbasis sekolah tersebut menyebutkan berhasil menjaga hingga 40 persen pengurangan *gateway* atau “pintu masuk” penyalahgunaan narkoba seperti rokok, alkohol, dan ganja (Pentz et al., 1996).

b. Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat)

Norma sosial dan pengaruh lingkungan (*peer educator* dan dukungan orang tua) menjadi mediator yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja (Pentz et al., 1996). Diskusi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba antara anak dan orang tua terbukti dapat membantu menurunkan angka penyalahgunaan narkoba; tingkat penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja yang pernah berdiskusi dengan orang tua lebih rendah dibandingkan anak dan remaja yang tidak pernah mendiskusikan tentang narkoba (*Office of National Drug Control Policy*, 2007). Program *demand reduction* yang kuat dapat membentuk norma yang tidak toleran terhadap penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan program penolakan narkoba yang konsisten dilakukan anak dan remaja, ditambah dengan program lain yang dilakukan para guru dan yang lainnya akan memberikan pesan konsisten di dalam masyarakat bahwa masyarakat siap mematuhi upaya penurunan penyalahgunaan narkoba (Pentz et al., 1996).

Office of National Drug Control Policy (ONDCP) Amerika Serikat menggunakan kekuatan media untuk menyebarkan informasi terkait bahaya narkoba selain kepada anak dan remaja, juga kepada orang tua dan masyarakat. Dengan menggunakan media televisi, radio, media cetak, media *online*, dan komunikasi dari luar rumah; media kampanye tersebut dapat meningkatkan persepsi tentang bahaya penyalahgunaan

narkoba dan penolakan di masyarakat. Melalui media tersebut juga dilakukan penyangkalan terhadap mitos dan pesan-pesan pro-narkoba yang beredar di kalangan masyarakat (*Office of National Drug Control Policy, 2007*).

Kegagalan program intervensi dengan pendekatan *demand reduction* sebagian besar berasal dari mengabaikan mengapa penyalahguna mulai dan terus menggunakan narkoba. Oleh karena itu, hal krusial yang perlu dianalisis adalah hubungan antara penyalahguna dengan lingkungan seperti angka pengangguran, kemiskinan, faktor budaya dan politik (Institute Burnet, n.d.).

c. Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba

Pendekatan *demand reduction* juga memfokuskan program intervensi kepada pengembangan masyarakat dan mencoba untuk menyelesaikan dari akar masalah penggunaan narkoba (Institute Burnet, n.d.). Beberapa daerah dimana obat-obatan terlarang diproduksi, menjadi daerah target utama untuk perluasan pasar narkoba. Faktor sosial dan ekonomi turut mempengaruhi hubungan antara *supply* dan *demand* dalam pemunculan pasar baru perdagangan narkoba. Ketika narkoba tersedia di daerah dengan perekonomian dan kondisi sosial buruk, perdagangan narkoba bisa menjadi salah satu sumber penghasilan (INCB, 2004). Kondisi sebaliknya penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan kesehatan yang menyebabkan peningkatan biaya kesehatan dan penurunan pendapatan populasi di daerah tersebut (Melis & Nougier, 2012).

Mayoritas yang terlibat dalam produksi narkoba bukan kalangan 'orang kaya', mereka juga tidak memilih terlibat jika tidak ada potensi yang menguntungkan. Faktanya, sebagian besar dari mereka tidak menjadi kaya dengan terlibat dalam produksi narkoba, mereka tetap miskin bahkan menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Tidak mengherankan jika produksi obat-obat terlarang banyak dikonsentrasikan pada negara berkembang dan dilakukan oleh populasi termiskin dan paling rentan. Contohnya di Myanmar dan Laos, narkoba diproduksi

di daerah dengan kondisi kesehatan rendah, buta huruf, infrastruktur fisik dan sosial tidak memadai, dan penduduknya merupakan populasi terpinggirkan dan atau mengalami diskriminasi oleh populasi etnis dominan. Kondisi serupa juga terjadi di Vietnam, Kolombia, dan Thailand. Pendekatan untuk mengurangi produksi dan penyalahgunaan narkoba di daerah rawan tersebut perlu melibatkan program yang bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi dan sosial pada populasi daerah tersebut. Strategi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas manusia, meningkatkan proteksi sosial, meningkatkan kesehatan masyarakat, menumbuhkan tatanan pemerintahan dan perekonomian yang baik, dan mengurangi kemiskinan. (Melis & Nougier, 2012).

Buxton (2015) mengatakan bahwa tanaman kokain, opium poppy, dan ganja merupakan komoditi yang tidak mudah rusak, harga jual tinggi, dan bisa tumbuh di daerah terpinggirkan, di daerah yang memiliki tanah kering dengan keterbatasan bahkan tidak ada irigasi sama sekali namun bisa menjadi sumber pendapatan (UNDP, 2015). Kondisi inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk memikirkan komoditi pengganti yang sepadan, sehingga warga dapat tetap mendapatkan penghasilan dari tanaman yang legal.

d. Penguatan Program Rehabilitasi

Menurut *Office of National Drug Control Policy* (2020) kecanduan adalah kondisi medis kronis yang memengaruhi otak dengan menyebabkan perubahan kognitif, perilaku dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa pengobatan paling efektif adalah pengobatan/terapi yang dapat mengatasi masalah kecanduan melalui layanan berkelanjutan dan struktur pendukung dalam periode waktu yang lama. Layanan rawat jalan pengobatan tersebut meliputi program rehabilitasi, layanan awal yang insensif seperti detoksifikasi, rawat inap dan pengobatan setempat. Perluasan ketersediaan layanan pengobatan perlu dilakukan untuk mengakses penyandang disabilitas dan usia lanjut, termasuk memastikan pusat layanan pengobatan dapat diakses.

Namun sayangnya, rata-rata penyalah guna narkoba yang membutuhkan pengobatan tersebut tidak berusaha mencarinya. Data *The National Survey of Drug Use and Health* (NSDUH) tahun 2018 menunjukkan bahwa diestimasikan 21,2 juta orang Amerika berusia 12 tahun ke atas membutuhkan layanan gangguan penyalahgunaan narkoba, namun hanya 3,7 juta orang yang mendapatkan layanan dan hanya 2,4 juta orang diantaranya yang mendapatkan layanan spesifik. Amerika Serikat berusaha mendorong penyalah guna narkoba yang membutuhkan untuk mencari pengobatan, membuat akses lebih baik, dan memastikan kecukupan kapasitas dan kualitas untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Pesan penting dalam pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan adalah bagaimana menanamkan pesan bahwa kecanduan narkoba merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh berbagai hal dan bukan semata karena kegagalan personal maupun pengaruh keluarga, namun pulih dari kecanduan juga merupakan suatu hal yang mungkin terjadi jika penyalah guna mau menjalankan rehabilitasi dengan baik dan benar walaupun mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Implementasi dukungan pemulihan dan kebijakan tempat kerja bebas narkoba adalah komponen penting lainnya untuk meningkatkan baik kesehatan individu maupun kesehatan komunitas, juga dampak ekonomi bagi pekerja yang menjadi penyalah guna narkoba. Beberapa layanan pengobatan/rehabilitasi yang dilakukan Amerika Serikat yaitu (*Office of National Drug Control Policy*, 2020) :

- 1) Meningkatkan respon dan pemantauan overdosis;
- 2) Meningkatkan perawatan kecanduan yang evidence-based;
- 3) Menghilangkan hambatan untuk mengakses ketersediaan layanan,
- 4) Meningkatkan peran pengadilan khusus narkoba dan program pengalihan;
- 5) Membangun layanan kecanduan di tempat kerja; dan
- 6) Meningkatkan efisiensi surveilans dan infrastruktur.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di atas, pemerintah Amerika Serikat juga melaksanakan mereka juga menyusun beberapa program pendukung pemulihan seperti:

- 1) Memanfaatkan organisasi pendukung pemulihan;
- 2) Meningkatkan kesempatan untuk bekerja bagi mereka yang sudah pulih dari kecanduan;
- 3) Memperluas pemahaman ilmiah tentang layanan dukungan pemulihan sejawat; dan
- 4) Mengurangi stigma dan membuat pemulihan adalah hal yang mungkin.

Kecanduan narkoba memiliki berbagai tingkatan dan variasi yang berbeda antara satu pecandu dengan pecandu yang lainnya. Adapun beberapa layanan rehabilitasi yang biasa dilakukan saat ini (Institute Burnet, n.d.) yaitu :

- 1) Detoksifikasi adalah program yang difokuskan untuk pengelolaan kembali dorongan psikis dan psikologi (abstinen) agar penyalah guna tidak ada keinginan untuk kembali menggunakan narkoba dalam jangka panjang. Program ini terbukti berhasil untuk membuat penyalah guna berhenti menggunakan narkoba dalam jangka pendek namun ada potensi *relapse* sehingga perlu dikombinasikan dengan program lain.
- 2) Rehabilitasi rumahan dilakukan dengan menginapkan penyalahguna ke dalam sebuah “rumah” atau yayasan yang didalamnya bukan hanya mengajak penyalah guna untuk melupakan narkoba tetapi juga diberikan pengetahuan dan skill untuk hidup mandiri setelah selesai menjalankan masa rehabilitasi.
- 3) Komunitas terapi merupakan program yang mirip dengan program rehabilitasi rumahan yaitu sebuah layanan pengobatan jangka panjang yang banyak digunakan di seluruh dunia, namun membutuhkan biaya besar, lambat memberikan hasil dan membutuhkan konsisten pelaksanaan program.
- 4) Terapi substitusi obat merupakan program yang terbukti memiliki hasil memuaskan bagi penyalah guna narkoba

khususnya mereka yang kronis. Substitusi obat yang biasanya digunakan adalah *methadone and buprenorphine*. Beberapa manfaat yang dirasakan dari program ini adalah:

- a) mengurangi angka kriminal,
- b) mengurangi penggunaan narkoba,
- c) meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan,
- d) mengurangi kebiasaan yang berisiko terhadap HIV/AIDS,
- e) meningkatkan tingkat retensi layanan, dan
- f) membantu penyalah guna narkoba untuk mendapatkan kembali atas kehidupan mereka dengan mengurangi kekambuhan.

Program rehabilitasi merupakan salah satu intervensi yang sangat baik jika dilakukan secara berkelanjutan. Data *Global Commision on Drug Policy* menunjukkan beberapa keberhasilan beberapa negara dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba (*Global Commission on Drug Policy*, 2011):

- 1) Switzerland, dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba jenis Heroin di tahun 1980 Switzerland mengimplementasikan kebijakan dan program berbasis kesehatan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan adalah substitusi heroin yang berhasil menurunkan angka kecanduan heroin diikuti dengan beberapa manfaat lain. Manfaat yang berkaitan dengan pasar perdagangan narkoba yaitu: mengurangi permintaan, mengurangi angka kriminal yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, dan dengan terhapusnya pecandu dan distributor, pengguna mengalami kesulitan mengontak penjual.
- 2) Inggris, penelitian mengatakan di Inggris perubahan kebijakan dari tahanan menjadi layanan pengobatan memberikan penurunan kasus pelanggaran. Penelitian menunjukkan jumlah dakwaan terhadap 1.476 penyalah guna narkoba pada tahun sebelumnya berkurang hingga 48 persen setelah diimplementasikan program rehabilitasi.
- 3) Belanda, program yang dilakukan pemerintah Belanda meliputi layanan pengobatan berskala besar, ambang batas rendah, dan layanan *harm reduction* termasuk akses jarum

suntik dan resep pemberian metadon dan heroin yang sangat ketat. Penentuan secara medis, heroin di Belanda ditemukan untuk mengurangi kriminal dan gangguan masyarakat, serta memberikan efek yang positif bagi orang yang berjuang dengan kecanduannya. Di tahun 2008, jumlah pecandu heroin berkurang menjadi 18.000 orang yang sebelumnya mencapai 30.000 orang di tahun 2001.

B. Metode Penyusunan Indeks Komposit Menurut OECD

Penyusunan Indeks P4GN menggunakan indeks komposit berdasarkan perumusan indeks komposit yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Indeks komposit yang dirumuskan oleh OECD merupakan indeks gabungan yang bertujuan membandingkan berbagai kinerja negara semakin diakui sebagai alat yang berguna dalam analisis kebijakan dan komunikasi publik. Indikator komposit tersebut memberikan perbandingan sederhana yang digunakan untuk menggambarkan masalah kompleks dan sulit dipahami di dalam berbagai bidang seperti bidang lingkungan, ekonomi, masyarakat dan perkembangan teknologi.

Masyarakat umum lebih mudah untuk menafsirkan indikator komposit daripada mengidentifikasi berbagai tren pada setiap indikator dan lebih jauh indeks komposit terbukti dapat berguna dalam pengukuran kinerja negara (Saltelli, 2007 dalam OECD, 2008). Kelemahan indeks komposit yang harus diantisipasi tim adalah dapat menyebabkan *misleading* kebijakan jika dibangun dengan kurang baik atau salah perumusan indikator pembentuk. Hasil ‘gambaran besar’ dari indeks komposit dapat membuat pengguna (terutama *policy maker*) menarik kesimpulan analitis atau kebijakan yang sederhana, padahal indikator komposit harus dilihat sebagai sarana awal diskusi kepentingan publik. Relevansi indikator pembentuk harus diukur sehubungan dengan konstituen yang terkena dampak indeks komposit.

OECD memberikan rekomendasi penyusunan indikator komposit yang ideal terdiri dari 10 (sepuluh) langkah, mulai dari penyusunan

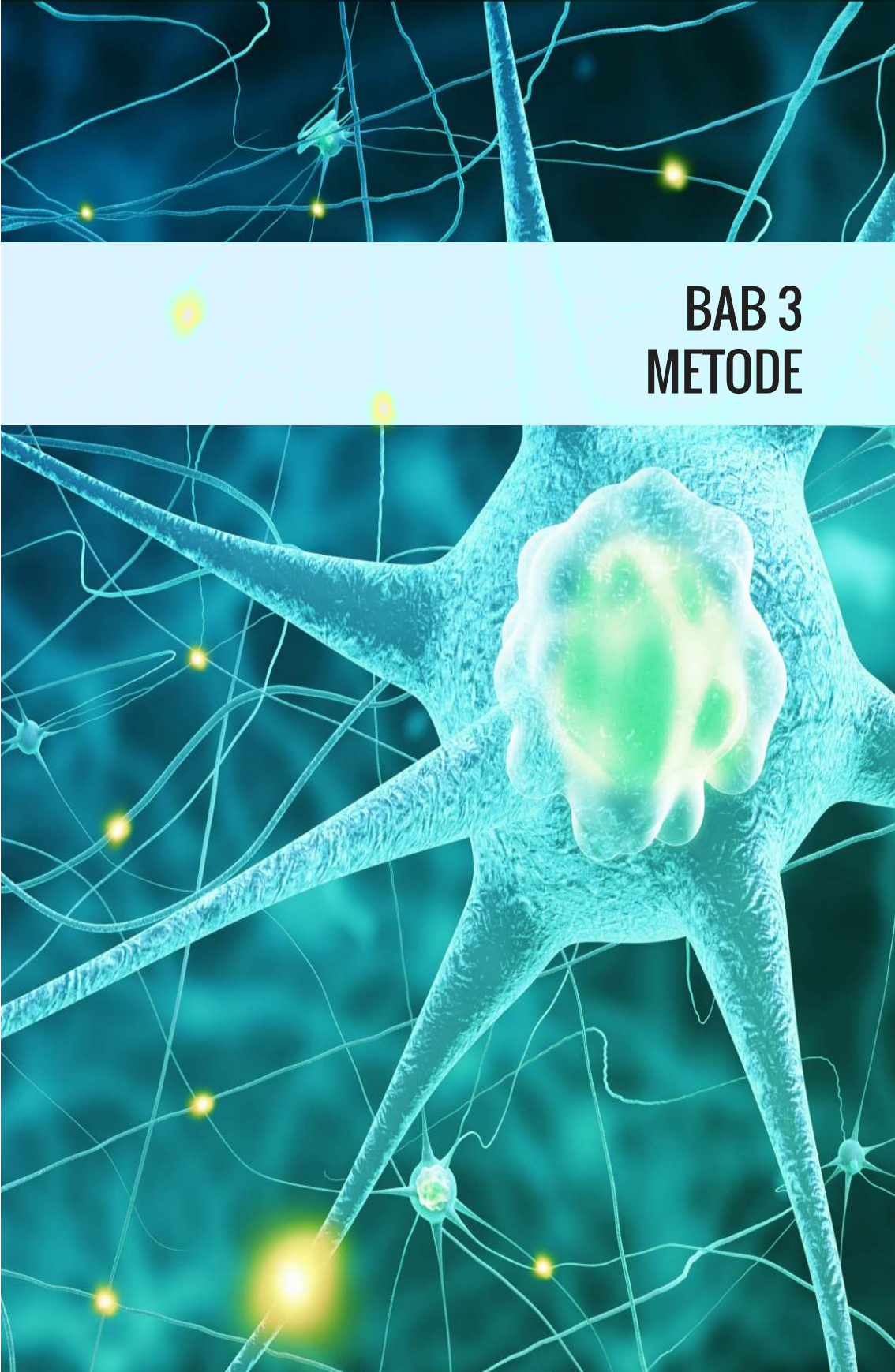
kerangka pikir hingga presentasi dan diseminasi hasil indeks komposit. Pilihan yang dibuat dalam satu langkah dapat berdampak penting pada langkah lainnya, oleh karena itu penyusunan indeks komposit tidak hanya untuk memilih metode terbaik pada setiap langkah melainkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara satu langkah dengan langkah lainnya.

Kelebihan dan kekurangan dari indeks komposit secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Indeks Komposit

Kelebihan	Kekurangan
Menyimpulkan keadaan multidimensi yang kompleks dengan pandangan untuk mendukung pembuat keputusan	Kemungkinan terjadi <i>misleading</i> info terkait kebijakan jika salah dalam interpretasi.
Lebih mudah ditafsirkan dibandingkan dengan indikator terpisah.	Dapat menyebabkan kesimpulan kebijakan sederhana saja.
Dapat menilai kemajuan negara dari waktu ke waktu.	Penyusunan indeks yang tidak transparan dan kurang memenuhi kaidah konseptual dan statistikal dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan indeks.
Mengurangi ukuran dari sekumpulan indikator tanpa mengurangi dasar informasi yang mendasarinya	Proses pemilihan indikator dan pembobotan dapat menyebabkan perselisihan politik.
Memungkinkan untuk memasukkan informasi tambahan dalam batas ukuran yang ada.	Memungkinkan untuk menyamarkan kegagalan serius beberapa dimensi sehingga menyulitkan dalam identifikasi tindakan perbaikan yang tepat.
Menempatkan isu-isu kinerja dan kemajuan negara di pusat arena kebijakan.	
Memfasilitasi komunikasi dengan publik (seperti masyarakat, media, dll) dan mempromosikan akuntabilitas.	
Membantu untuk membangun narasi untuk masyarakat awam.	
Memungkinkan pengguna untuk membandingkan dimensi kompleks secara efektif.	

Sumber: OECD, 2008



BAB 3 METODE

STOP!! NARKOBA

"KEPUTUSAN ADALAH PILIHANMU"



COBA, CELAKA

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang berasal dari kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh BNN dan BNNP. Data kuantitatif tersebut dikumpulkan dengan menggunakan formulir pengumpulan data berisi kolom data capaian kinerja yang dilakukan oleh BNN, BNNP dan instansi terkait.

B. Sumber Data

Kajian penyusunan Indeks P4GN Tahun 2020 menggunakan data sekunder hasil kinerja BNN, BNNP dan instansi terkait. Sumber data sekunder pendukung lainnya diakses oleh tim adalah Badan Pusat Statistik. Adapun sumber data yang diakses adalah data resmi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN dan data yang berasal dari sistem pendataan resmi milik BNN. Data yang diperoleh diinput pada *worksheet* yang berisi daftar indikator. Satuan kerja BNN di tingkat pusat dan provinsi yang memberikan data untuk penyusunan indikator dalam penyusunan indeks P4GN adalah:

1. Deputi Bidang Pemberantasan
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Deputi Bidang Pencegahan
4. Deputi Bidang Rehabilitasi
5. Biro SDM dan Organisasi Sekretariat Utama
6. Biro Umum Sekretariat utama
7. Badan Narkotika Nasional Provinsi

Adapun dokumen hasil kinerja dan publikasi yang diakses dalam pengukuran Indeks P4GN, antara lain:

1. LKIP Badan Narkotika Nasional Tahun 2019
2. LKIP Deputy Bidang Pemberantasan BNN 2019
3. LKIP Deputy Bidang Rehabilitasi BNN 2019
4. LKIP Deputy Bidang Pencegahan BNN 2019
5. LKIP Deputy Bidang Rehabilitasi BNN 2019
6. LKIP BNNP 2019
7. Hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019
8. *Indonesia Drugs Report* Tahun 2019
9. Sistem Informasi Narkoba

C. Ruang Lingkup

Kajian penyusunan Indeks P4GN dilakukan tahun 2020 untuk menghitung Indeks P4GN berdasarkan data hasil kinerja BNN Tahun 2019. Indeks P4GN Tahun 2020 menggambarkan keberhasilan kinerja Program P4GN di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

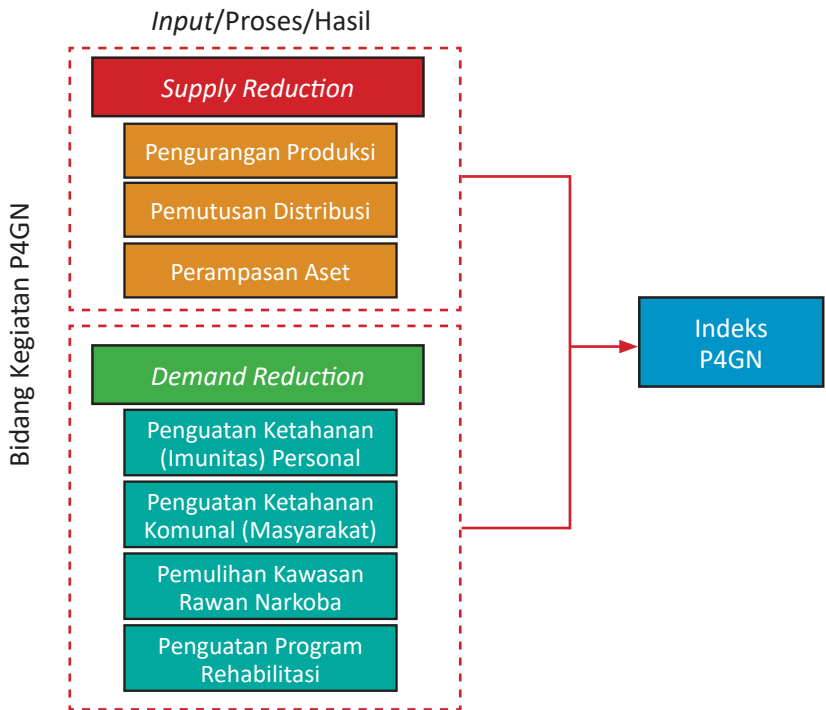
D. Metode Perhitungan Indeks

Kajian penyusunan indeks P4GN mengadopsi perumusan indeks komposit yang digambarkan pada buku pedoman penyusunan indeks yang diterbitkan oleh OECD dengan judul *"Handbook on Constructing Indicators Methodology and User Guide"* tahun 2008. Buku panduan penyusunan indeks tersebut digunakan oleh setiap negara dalam menghasilkan indeks yang bersifat *official statistics*. Perhitungan Indeks P4GN dilakukan sesuai dengan tahapan yang dijelaskan dalam buku panduan. Secara detail berikut tahap penyusunan indeks yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja:

1. Penyusunan Kerangka Pikir

Kajian ini mendefinisikan Program P4GN sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah narkoba dari dua sisi yaitu sisi permintaan dan persediaan narkoba di Indonesia. Dua kondisi permasalahan tersebut mendorong tim melakukan penyusunan indeks P4GN berdasarkan dua dimensi penanganan masalah narkoba yang digunakan pada kajian ini adalah *demand reduction* dan *supply reduction*. *Demand reduction* menggambarkan pengurangan permintaan narkoba, sedangkan *supply reduction*

menggambarkan pengurangan penawaran narkotika. Selain itu dalam pembentukannya juga mempertimbangkan aspek perspektif (*input*, proses, dan *output*) dan aspek bidang kegiatan (pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi), seperti terlihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Pembentukan Indeks P4GN

2. Penyusunan Dimensi dan Indikator

Sejak bulan Maret 2020, tim kelompok kerja penyusunan Indeks P4GN melaksanakan 8 (delapan) tahapan terstruktur untuk menurunkan dua dimensi penanganan masalah narkoba menjadi indikator yang lebih jelas dan terukur. Kedelapan tahapan yang dilakukan tim, sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian literatur (*literature review*) terkait kegiatan P4GN.
- b. Melakukan kajian literatur tentang dimensi pengukuran indeks.
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) kajian literatur untuk memperoleh dimensi pengukuran indeks.

- d. Mengidentifikasi dan evaluasi dimensi pengukuran indeks.
- e. Melakukan kajian literatur terkait indikator setiap dimensi.
- f. FGD kajian literatur untuk memperoleh indikator setiap dimensi.
- g. Identifikasi akurasi indikator melalui *mapping* indikator berdasarkan ketersediaan data BNN dan ketersediaan data instansi terkait.
- h. Menyepakati dimensi dan indikator pengukuran Indeks P4GN.

Untuk memudahkan proses pengumpulan data, tim peneliti sepakat untuk mengelompokkan indikator berdasarkan program kerja ke deputian BNN hingga membentuk variabel. Berikut jumlah indikator pembentuk variabel pada setiap dimensi pengukuran indeks P4GN.

- a. Dimensi *Supply Reduction*, terbentuk dari 3 (tiga) variabel sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan produksi dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 15 indikator.
 - 2) Pemutusan distribusi dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 7 indikator.
 - 3) Perampasan aset dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 6 indikator.
- b. Dimensi *Demand Reduction*, dibentuk dari 4 (empat) variabel sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 9 indikator.
 - 2) Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat) dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 8 indikator.
 - 3) Pemulihan Kawasan Narkoba dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 7 indikator.
 - 4) Penguatan Program Rehabilitasi dengan jumlah indikator yang diajukan sebanyak 14 indikator.

Rincian konsep dan definisi indikator yang diajukan dapat dilihat secara lebih rinci pada Lampiran 1. Dua dimensi tersebut juga ditelusuri berdasarkan unsur kinerja yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu input, proses, dan hasil. Adapun komponen *input*, proses dan hasil yang dimaksud kajian ini adalah:

- a. Komponen *Input*
 - 1) Aparat bertugas pemberantasan narkoba
 - 2) Biaya kegiatan pemberantasan narkoba

- 3) Petugas yang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba
 - 4) Senjata untuk aparat pemberantasan narkoba
 - 5) Rumah tahanan
 - 6) Lembaga Pemasyarakatan
 - 7) Penyuluh narkoba
 - 8) Relawan anti narkoba
 - 9) Sumber biaya kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
 - 10) Sumber biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - 11) Kendaraan Penyuluhan P4GN
 - 12) Penggiat anti narkoba
 - 13) Spot Billboard
 - 14) Videotron
 - 15) Persentase penyerapan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi
 - 16) Fasilitas rehabilitasi yang melaksanakan rehabilitasi narkoba
 - 17) Jenis standar fasilitas rehabilitasi di BNNP
- b. **Komponen Proses**
- 1) Penyelidikan dan penangkapan kasus produksi narkoba (Clandestine Lab)
 - 2) Barang bukti kasus produksi narkoba (Clandestine Lab)
 - 3) Penyidikan kasus produksi gelap narkoba (Clandestine Lab)
 - 4) Penyelidikan lokasi lahan tanaman narkoba
 - 5) Pengawasan penggunaan prekursor narkoba
 - 6) Penyelidikan TPPU Hasil tindak pidana narkoba
 - 7) Penyidikan TPPU Hasil tindak pidana narkoba
 - 8) Kegiatan KIE P4GN
 - 9) Persentase keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi kegiatan pemberdayaan alternatif.
- c. **Komponen *Output***
- 1) Berkas perkara kasus produksi narkoba
 - 2) Titik lokasi lahan tanaman narkoba dimusnahkan
 - 3) Luas lahan tanaman ganja dimusnahkan
 - 4) Clandestine Lab narkoba diungkap
 - 5) Berkas perkara kasus peredaran narkoba
 - 6) Barang bukti narkoba
 - 7) Pengawasan penggunaan prekursor industri
 - 8) Berkas perkara penyidikan TPPU hasil tindak pidana narkoba
 - 9) Tersangka TPPU hasil tindak pidana narkoba
 - 10) Nilai aset TPPU narkoba

- 11) Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba
- 12) Ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba
- 13) Indeks kemandirian masyarakat dalam P4GN
- 14) Indeks keterpulihan daerah rawan
- 15) Indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan
- 16) Indeks mutu layanan rehabilitasi
- 17) Indeks kualitas hidup klien rehabilitasi
- 18) Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi

3. Imputasi Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Indeks P4GN berasal dari satuan kerja BNN. Data yang terkumpul tidak mengandung *missing value*. Apabila terdapat data dengan nilai nol, hal tersebut memang merupakan kondisi riil di lapangan. Sehingga proses imputasi tidak dilakukan pada kajian ini.

4. Proses Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan objek kajian pada statistika yang mempelajari perilaku dan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dasar dari kajian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi untuk dua variabel. Prinsip yang sama kemudian dikembangkan untuk lebih dari dua variabel. Salah satu bentuk proses analisis multivariat pada kajian ini adalah uji validitas dan reliabilitas indikator Indeks P4GN untuk menentukan indikator yang memenuhi secara statistik yaitu adanya korelasi antar variabel/indikator. Tim peneliti pun mencoba mengembangkan proses penyusunan indeks dengan menggunakan analisis faktor dengan menggunakan *Principal Component Analysis*. Dikarenakan jumlah sampel yang digunakan sangat sedikit atau hanya sejumlah 34 provinsi di Indonesia, maka penyusunan indeks dengan analisis faktor tidak jadi dilakukan.

Indikator pembentuk indeks pada kajian ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah aspek kecermatan pengukuran, dalam hal ini alat ukur adalah indikator pembentuk indeks P4GN. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat pun memiliki kecermatan tinggi. Kecermatan diartikan sebagai kemampuan mendeteksi perbedaan kecil yang ada

pada atribut yang diukur. Uji validitas adalah uji untuk menunjukkan keterhandalan alat ukur dalam mengukur fenomena atau kondisi. Hasil uji validitas tinggi menunjukkan bahwa alat ukur memberikan hasil ukur tepat dan akurat sesuai dengan maksud kajian. Hasil uji validitas rendah menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan tidak relevan untuk mengukur.

Pengujian validitas meliputi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor digunakan bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor dilakukan dengan membuat korelasi antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), caranya dengan membuat korelasi antara skor item dengan skor total item. Penghitungan korelasi menghasilkan koefisien korelasi untuk mengukur tingkat validitas item dan untuk menentukan kelayakan item. Penentuan kelayakan item biasanya melalui uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya *item* dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Rumus korelasi yang digunakan adalah sebagai berikut (Supranto, 2009):

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = nilai koefisien korelasi

$\sum XY$ = jumlah perkalian indikator X dan Y

$\sum X$ = jumlah nilai indikator X

$\sum Y$ = jumlah nilai indikator Y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat nilai indikator X

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat nilai indikator Y

Bila nilai $r_{xy} > r_{(tabel; 0,05)}$ maka indikator tersebut dinyatakan valid. Sedangkan untuk melihat realibilitasnya digunakan rumus:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sum \sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

- r = nilai koefisien reliabilitas
- k = jumlah item indikator yang diuji
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians skor setiap item
- σ_t^2 = varians total

Jika $\alpha > 0,90$ maka reliabilitas sempurna. Jika α antara $0,70 - 0,90$ maka reliabilitas tinggi. Jika α $0,50 - 0,70$ maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha < 0,50$ maka reliabilitas rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Hasil uji reliabilitas perlu mempertimbangkan kepentingan dari indikator yang telah dirumuskan berdasarkan aspek teoritis. Bila terdapat indikator yang secara teori perlu digunakan, namun tidak memenuhi uji reliabilitas maka indikator yang dipandang perlu secara teori dapat digunakan dengan mempertimbangkan penilaian indikatornya. Hasil uji validitas dan reliabilitas menghasilkan reduksi sejumlah indikator yang tidak memenuhi.

5. Normalisasi Data

Normalisasi terhadap data dilakukan untuk mengatasi perbedaan satuan dari setiap indikator. Menurut *OECD Handbook* terdapat beberapa cara untuk melakukan normalisasi data, antara lain:

- a. Standarisasi normal Z dengan proses transformasi Z, dengan cara data asli dikurangi dengan nilai rata-rata kemudian dibagi dengan simpangan baku.
- b. Metode minimum maksimum, yaitu dengan mengurangi nilai indikator dengan nilai minimum kemudian dibagi dengan selisih antara nilai maksimum dan minimum.

Pada penyusunan indeks P4GN, proses normalisasi data digunakan metode minimum maksimum.

6. Penentuan Penimbang serta Metode Agregasi

Tiap indikator memiliki kepentingan sama terhadap dimensi, sehingga nilai tiap indikator memiliki bobot sama. Jumlah Indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks P4GN ini adalah 46 indikator meliputi 17 indikator untuk menjelaskan dimensi *supply reduction* dan 29 indikator untuk menjelaskan dimensi *demand reduction*. Bila diasumsikan setiap indikator memiliki kepentingan yang sama terhadap dimensi, maka total nilai untuk penghitungan indeks adalah 46. Penyusunan indikator perlu mempertimbangkan kinerja dari setiap satuan kinerja, maka dibuat variabel yang terdiri dari beberapa indikator. Oleh karena itu, diperlukan penimbang berdasarkan variabel yang dibentuk dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks P4GN} = w_1 * \text{Supply Reduction} + w_2 * \text{Demand Reduction}$$

w_1 = weight untuk dimensi Supply Reduction

w_2 = weight untuk dimensi Demand Reduction

Dan untuk mendapatkan nilai masing-masing dimensi adalah:

$$\text{Supply Reduction} = \alpha_1 * \text{Produksi} + \alpha_2 * \text{Distribusi} + \alpha_3 * \text{Aset}$$

α_i = weight untuk indikator pada Supply Reduction

$$\text{Demand Reduction} = \beta_1 * \text{Personal} + \beta_2 * \text{Komunal} + \beta_3 * \text{Kawasan} + \beta_3 * \text{Rehab}$$

β_i = weight untuk indikator pada Demand Reduction

Berdasarkan hal tersebut, Tim mengajukan tiga skenario penentuan penimbang dimensi *demand reduction* dan *supply reduction* sebagai penyusun indeks P4GN. Komposisi persentasi yang digunakan akan menunjukkan kontribusi masing-masing dimensi terhadap indeks P4GN. Skenario pertama menggunakan penimbang yang sama yaitu 50 persen untuk masing-masing dimensi. Skenario kedua menggunakan penimbang yang dihitung secara proporsional terhadap jumlah indikator. Skenario ketiga menggunakan penimbang yang merupakan rata-rata penimbang yang didapatkan dari sesi FGD di delapan provinsi.

7. Pengujian Kekuatan dan Kepekaan

Setelah diperoleh angka indeks P4GN di tingkat nasional (BNN), perlu dilakukan uji kekuatan dan kepekaan indeks. Kualitas indeks sangat tergantung pada ketepatan asumsi yang digunakan. Hal ini mensyaratkan bahwa indeks yang terbentuk harus mampu menyediakan evaluasi dari keyakinan, ketidakpastian dan pilihan subyektif yang diambil. Dengan demikian dapat membantu mengukur ketangguhan, transparansi, hingga mengidentifikasi provinsi mana yang dikuatkan atau dilemahkan akibat penggunaan asumsi dalam penghitungan indeks. Dalam penyusunan indeks ini, analisis kekuatan dan kepekaan tidak dilakukan mengingat terbatasnya ketersediaan data sehingga sulit melakukan penambahan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian program P4GN.

8. Dekomposisi Indeks Komposit

Indeks P4GN merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks *supply reduction* dan indeks *demand reduction*. Dekomposisi indeks komposit yang telah terbentuk dilakukan dengan metode dekomposisi aditif, artinya indeks dipecah menjadi indeks pembentuk yang jika diakumulasi akan menjadi angka indeks P4GN.

9. Mengaitkan Indeks Komposit dengan Indikator Lainnya

Untuk mengukur ketepatangunaan indeks P4GN sebagai alat ukur keberhasilan kinerja, maka tim peneliti melakukan perbandingan dengan beberapa indeks komposit yang menghitung kinerja program, seperti:

- Indeks ketahanan nasional yang dihitung oleh Bappenas.
- *Organized Crime Index Africa* yang menggambarkan kinerja pemberantasan kejahatan terorganisir di Afrika.

10. Visualisasi Hasil Indeks Komposit yang Terbentuk

Hasil indeks P4GN disajikan dalam bentuk visualisasi berupa grafik dan peta. Indeks P4GN disajikan menurut provinsi dan dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Selain itu juga disajikan indikator-indikator pembentuk indeks P4GN yang dikelompokkan menurut variabel yang dibuat terintegrasi dengan tupoksi satuan kerja di BNN.

Tahapan perhitungan indeks P4GN yang dilakukan tim, adalah sebagai berikut:

- a. Menginput data yang diperoleh dari sumber data seperti yang dijelaskan pada sub bab 3B.
- b. Menghitung nilai indikator sesuai dengan definisi operasional seperti yang dijelaskan pada Lampiran 1.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap indikator yang memiliki sentimen negatif. Misalnya jika suatu indikator yang menunjukkan kinerja tetapi secara luas dianggap merupakan sesuatu yang negatif. Indikator semacam ini perlu mendapat perhatian khusus agar menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- d. Menentukan nilai maksimum atau batas atas (*frontier*) dan nilai minimum atau batas bawah untuk setiap indikator.
- e. Melakukan normalisasi setiap indikator dengan rumus:

$$\text{Nilai Normalisasi} = \frac{\text{Nilai Indikator} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

Keterangan:

Nilai Indikator : nilai sesuai dengan data hasil kinerja

Nilai Minimum : nilai terkecil dari indikator

Nilai Maksimum : nilai terbesar dari indikator

- f. Melakukan pengolahan hasil normalisasi menjadi nilai indikator. Nilai setiap indikator berada pada rentang 0-1. Penjelasan nilai indikator dapat dilihat pada Lampiran 2.
- g. Melakukan skenario penimbang untuk melihat konsistensi dari setiap pilihan bobot.
- h. Menetapkan penimbang indeks seperti pada sub bab 3E.
- i. Setelah nilai indikator diperoleh, dan penimbang telah ditetapkan, indeks P4GN dihitung berdasarkan rumus 1 pada persamaan di sub bab 2D.
- j. Melakukan pemeriksaan terhadap angka indeks yang dihasilkan dengan membandingkan dengan angka indeks komposit lain untuk mengukur kinerja.
- k. Melakukan penghitungan untuk indeks P4GN di tingkat provinsi.

Perhitungan Indeks P4GN di tingkat provinsi, terdapat penyesuaian untuk membuat nilai indikator. Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Lampiran 3):

- a. Denominator untuk menghitung kapasitas maksimum menggunakan jumlah kabupaten kota setiap provinsi. Data yang digunakan berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
- b. Denominator untuk menghitung luas hutan menggunakan luas hutan setiap provinsi. Data yang digunakan berasal dari BPS.
- c. Denominator untuk mengukur cakupan menggunakan jumlah penduduk setiap provinsi yang berasal dari BPS.

E. Focus Group Discussion (FGD)

Data yang terkumpul dan di *input* oleh petugas pengumpul data, kemudian dilakukan konfirmasi secara bertahap dan berulang melalui forum diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk menemukan kesepakatan seluruh tim kelompok penyusun indeks terkonsep mulai dari dimensi sampai dengan indikator yang digunakan sebagai pembentuk indeks. FGD dilakukan di tingkat pusat dan di 8 (delapan) provinsi terpilih. FGD di tingkat pusat dilakukan bersama-sama dengan tim dan satuan kerja di BNN Pusat secara berkala. Di tingkat Provinsi, FGD juga melibatkan 9 (sembilan) instansi terkait untuk mengetahui ketersediaan data hasil pelaksanaan Program P4GN di instansi masing-masing jika pengukuran indeks bukan hanya sebagai pengukuran keberhasilan pelaksanaan Program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN tetapi dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

FGD di tingkat provinsi dilakukan dalam rangka menjajaki kemungkinan penghitungan indeks P4GN yang melibatkan institusi lain yang terlibat dalam kegiatan P4GN selain BNN. Tujuan FGD ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali pelaksanaan dan kondisi data P4GN di tingkat Provinsi.
2. Menyamakan persepsi pelaksana terkait dengan indikator P4GN.
3. Mengetahui persentase prioritas *supply reduction* dan *demand reduction* berdasarkan pandangan para pelaksana.

FGD dilakukan di 8 (delapan) provinsi dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik nasional mencakup demografi, kelengkapan institusi, dan budaya. Delapan provinsi tersebut adalah:

1. Kepulauan Riau
2. Lampung
3. DI Yogyakarta
4. Bali
5. Nusa Tenggara Timur
6. Kalimantan Timur
7. Kalimantan Selatan
8. Sulawesi Selatan

FGD dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang di BNNP dan 9 (sembilan) orang perwakilan dari instansi:

1. Kejaksaan Tinggi
2. Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah
3. Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi
4. Badan Kesbangpol Provinsi
5. Bea Cukai
6. Dinas Komunikasi dan Informasi
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pemuda dan Olahraga.





BAB 4

HASIL PERHITUNGAN INDEKS

HEBAT TANPA NARKOBA



RV BAH
SEL
BARAF

ALITAS
HIDUP
BURUK

Caraku

HILANG SADRAN

Perusak-
kan
Draf

A. Indikator Pembentuk Indeks P4GN

Hasil FGD dengan perwakilan satuan kerja BNN, diusulkan 66 indikator sebagai penyusun indeks P4GN. Keberadaan 66 indikator tersebut dinilai berkesinambungan dan berasal dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BNN dan BNNP. 66 indikator tersebut harus melalui uji validitas untuk mendapatkan indikator terandalkan. Penentuan kelayakan, dilakukan melalui uji koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu indikator dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Tabel 2. Jumlah Indikator Pembentuk Indeks

Dimensi	Variabel	Jumlah Indikator Yang Diuji	Jumlah Indikator Valid
<i>Supply Reduction</i>	Pengurangan Produksi	15	8
	Pemutusan Distribusi	7	6
	Perampasan Aset	6	3
<i>Demand Reduction</i>	Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal	9	7
	Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat)	8	8
	Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba	7	5
	Penguatan Program Rehabilitasi	14	9
Jumlah		66	46

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa ada sebanyak 46 dari 66 indikator yang diajukan terpilih menjadi indikator penyusun indeks P4GN. Empat puluh enam (46) indikator tersebut telah lulus uji validasi dengan rincian 17 indikator penyusun dimensi *supply reduction*, dan 29 indikator penyusun *demand reduction*. Adapun indikator dimasing-masing dimensi tersebut adalah :

1. Dimensi *Supply Reduction* :

a. Pengurangan Produksi

- 1) Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan dibagi jumlah provinsi
- 2) Luas lahan tanaman ganja yang dimusnahkan
- 3) Penyelidikan lokasi lahan tanaman narkotika
- 4) Aparat bertugas pemberantasan narkoba
- 5) Persentase realisasi anggaran
- 6) Senjata untuk aparat pemberantasan narkoba
- 7) Kasus yang diterima rumah tahanan (rutan) BNN
- 8) Tersangka yang diterima rutin BNN

b. Pemutusan Distribusi

- 1) Berkas perkara kasus peredaran Narkotika
- 2) Barang bukti Narkotika
- 3) Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba
- 4) Tersangka kasus tindak pidana narkoba
- 5) Peta jaringan hasil penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika
- 6) Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

c. Perampasan Aset

- 1) Berkas Perkara Penyidikan TPPU Hasil TP Narkotika
- 2) Tersangka TPPU Hasil TP Narkotika
- 3) Nilai Aset TPPU Narkotika

2. Dimensi *Demand Reduction* :

a. Ketahanan Personal

- 1) Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba
- 2) Penyebarluasan informasi P4GN
- 3) Jumlah kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi (Media Cetak, Penyiaran, dan *Online*)
- 4) Sebaran kegiatan KIE
- 5) Jumlah jabatan fungsional untuk penyuluh narkoba dan penggerak swadaya masyarakat

- 6) Biaya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- 7) Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Ketahanan Komunal (Masyarakat)**
 - 1) Indeks kemandirian masyarakat dalam P4GN
 - 2) Institusi atau lembaga responsif dalam penanganan permasalahan narkoba
 - 3) Kegiatan bidang advokasi
 - 4) Peserta kegiatan advokasi
 - 5) Peserta kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh BNNP
 - 6) Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba
 - 7) Penggiat anti narkoba
 - 8) Relawan anti narkoba
- c. Pemulihan Kawasan Rawan**
 - 1) Prevalensi pernah pakai narkoba
 - 2) Prevalensi setahun pakai narkoba
 - 3) Titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif
 - 4) Jumlah peserta kegiatan program pelatihan pemberdayaan alternatif
 - 5) Titik kawasan rawan narkoba
- d. Penguatan Program Rehabilitasi**
 - 1) Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi
 - 2) Penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah
 - 3) Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi Instansi pemerintah
 - 4) Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi Komponen masyarakat
 - 5) Jumlah fasilitas rehabilitasi yang ada keterlibatan BNN dalam pengelolaannya
 - 6) Jumlah fasilitas rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN
 - 7) Jumlah klien rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap di fasilitas rehabilitasi BNN (BNNP, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi)
 - 8) Fasilitas layanan pasca rehabilitasi
 - 9) Klien layanan pasca rehabilitasi

Nilai Indikator dan Normalisasi

Data yang digunakan untuk suatu indikator tidak langsung dimasukkan untuk penghitungan indeks, namun harus melalui proses operasional variabel dan normalisasi data. Operasional variabel adalah definisi yang rumusan yang menggunakan operasionalisasi konsep, sehingga variabel dapat diukur. Operasional variabel diharapkan dapat mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan dalam pengukurannya.

Normalisasi data bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang paling sesuai diterapkan pada masalah pengerjaan dengan mempertimbangkan sifat dari indikator sehubungan dengan unit pengukuran dimana indikator tersebut diekspresikan, dan ketahanannya terhadap kemungkinan adanya pencilaan data. Nilai normalisasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil normalisasi. Operasional variabel dan normalisasi data dapat dilihat pada Lampiran 3.

Penyesuaian Nilai Indikator pada Indeks P4GN Provinsi

Penghitungan Indeks P4GN di tingkat nasional dilakukan berdasarkan informasi dari satuan kerja BNN dan BNNP. Nilai indikator yang dibentuk juga berdasarkan data tersebut. Penghitungan indeks P4GN di tingkat provinsi memerlukan penyesuaian agar lebih rasional. Penyesuaian penghitungan nilai indikator tersebut meliputi:

1. Jumlah penduduk provinsi
2. Luas hutan per provinsi
3. Jumlah kabupaten kota di setiap provinsi
4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam kegiatan P4GN di setiap provinsi.

Penyesuaian data tidak mengurangi kepentingan penghitungan indeks P4GN, sebagai contoh untuk mendapatkan nilai indikator pada indikator berkas perkara kasus peredaran narkotika yang ada di variabel pemutusan distribusi, jika angka nasional sebesar 1.269 berkas, maka nilai indikator adalah 1.269 dibagi dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia dan dibagi lagi dengan jumlah rata-rata berkas perkara di setiap kabupaten/kota. Dalam hal ini, karena informasi rata-rata jumlah berkas perkara di setiap kabupaten/ kota tidak tersedia, maka digunakan asumsi 5 berkas perkara di setiap kabupaten/ kota.

B. Nilai Indeks P4GN

Hasil pengolahan data dengan *google spreadsheet* diperoleh Indeks P4GN di tingkat nasional sebesar 53,14 atau artinya jika diasumsikan terdapat 100 kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 2020, 53 kejadian dapat ditangani oleh BNN. Untuk mendapatkan nilai indeks sebelumnya dilakukan perhitungan nilai normalisasi per indikator. Nilai normalisasi per indikator diperoleh dari total nilai normalisasi dari setiap indikator pada setiap variabel dibagi dengan jumlah indikator pada variabel tersebut. Nilai normalisasi per indikator bisa dimaknai sebagai rata-rata nilai per indikator setelah dilakukan normalisasi. Selanjutnya, dilakukan pembobotan berdasarkan jumlah indikator di setiap variabel pada setiap dimensi untuk mendapatkan nilai dimensi tertimbang dan diperoleh nilai dimensi tertimbang untuk *supply reduction* sebesar 0,45 dan *demand reduction* sebesar 0,59. Kemudian dilakukan kembali pembobotan untuk setiap dimensi berdasarkan jumlah variabel dan akhirnya diperoleh nilai indeks P4GN (Tabel 3).

Tabel 3. Indeks P4GN menurut Variabel dan Dimensi

Variabel	Jumlah Indikator	Nilai Normalisasi	Nilai Normalisasi per Indikator*)	Nilai Dimensi Tertimbang **)	Indeks P4GN ***)	
Supply Reduction	17	7,69		0,45	53,14	
Pengurangan Produksi	8	4,02	0,50			
Pemutusan Distribusi	6	3,25	0,54			
Perampasan Aset	3	0,43	0,14			
Demand Reduction	29	17,13		0,59		
Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal	7	3,65	0,52			
Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat)	8	4,22	0,53			
Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba	5	2,89	0,58			
Penguatan Program Rehabilitasi	9	6,38	0,71			

*) Nilai Normalisasi per Indikator = Nilai Normalisasi dibagi dengan Jumlah Indikator

**) *Supply Reduction* = $(8/17) \times 4,02 + (6/17) \times 3,25 + (3/17) \times 0,43$

Demand Reduction = $(7/29) \times 3,65 + \dots + (9/19) \times 6,38$

***) Indeks P4GN = $(3/7) \times 0,45 + (4/7) \times 0,59$

Dekomposisi Indeks

Dekomposisi indeks dilakukan untuk melihat karakteristik capaian kinerja Program P4GN di tiap provinsi melalui pendekatan dimensi *supply*

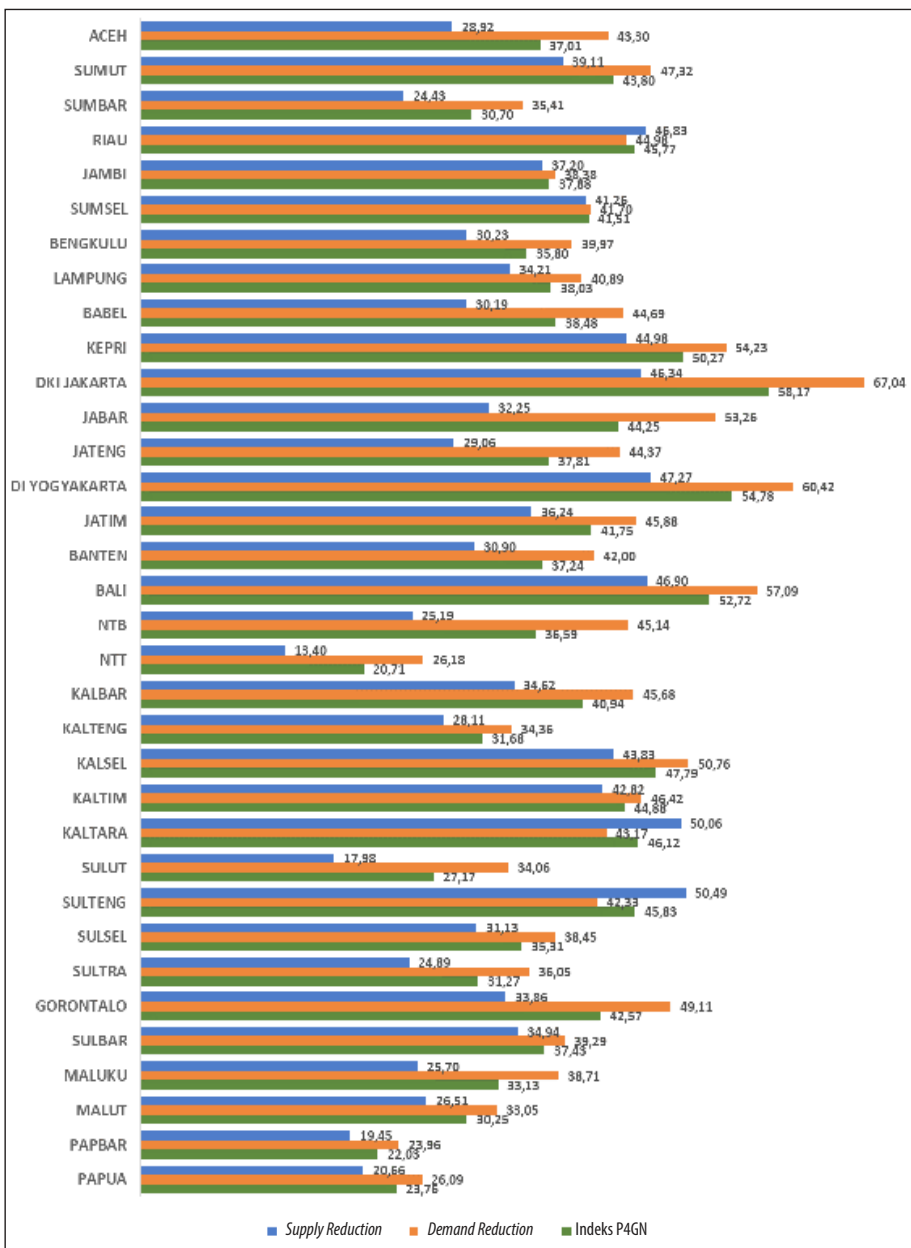
reduction dan *demand reduction*. Hasil dekomposisi indeks P4GN berdasarkan dimensi *supply reduction* dan *demand reduction* ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Dekomposisi Indeks P4GN 2019 Menurut Provinsi

PROVINSI	SUPPLY REDUCTION	DEMAND REDUCTION	INDEKS P4GN
Aceh	28,92	43,07	37,01
Sumatera Utara	39,11	47,32	43,80
Sumatera Barat	24,43	35,41	30,70
Riau	46,83	44,98	45,77
Jambi	37,20	38,38	37,88
Sumatera Selatan	41,26	41,70	41,51
Bengkulu	30,23	39,97	35,80
Lampung	34,21	40,89	38,03
Bangka Belitung	30,19	44,69	38,48
Kepulauan Riau	44,98	54,23	50,27
DKI Jakarta	46,34	67,04	58,17
Jawa Barat	32,25	53,26	44,25
Jawa Tengah	29,06	44,37	37,81
DI Yogyakarta	47,27	60,42	54,78
Jawa Timur	36,24	45,88	41,75
Banten	30,90	42,00	37,24
Bali	46,90	57,09	52,72
Nusa Tenggara Barat	25,19	45,14	36,59
Nusa Tenggara Timur	13,40	26,18	20,71
Kalimantan Barat	34,62	45,68	40,94
Kalimantan Tengah	28,11	34,36	31,68
Kalimantan Selatan	43,83	50,76	47,79
Kalimantan Timur	42,82	46,42	44,88
Kalimantan Utara	50,06	43,17	46,12
Sulawesi Utara	17,98	34,06	27,17
Sulawesi Tengah	50,49	42,33	45,83
Sulawesi Selatan	31,13	38,45	35,31
Sulawesi Tenggara	24,89	36,05	31,27
Gorontalo	33,86	49,11	42,57
Sulawesi Barat	34,94	39,29	37,43
Maluku	25,70	38,71	33,13
Maluku Utara	26,51	33,05	30,25
Papua Barat	19,45	23,96	22,03
Papua	20,66	26,09	23,76

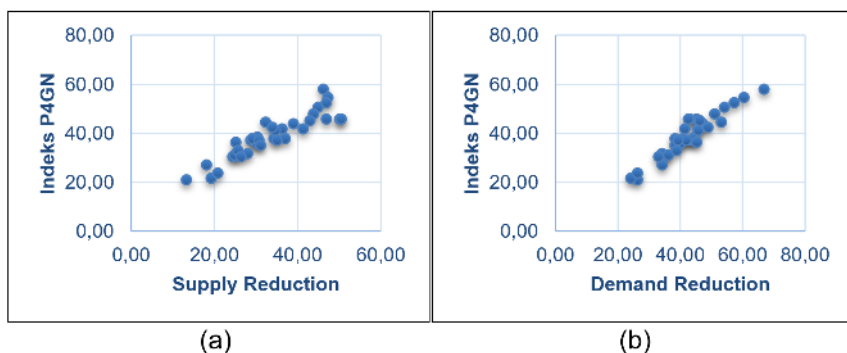
Pada Tabel 4 memperlihatkan dekomposisi Indeks P4GN provinsi berdasarkan dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Berdasarkan dimensi *supply reduction*, terdapat 10 provinsi yang memiliki nilai di antara 40-60. Sedangkan berdasarkan dimensi *demand reduction*, 2 provinsi memiliki nilai di atas 60 dan 17 provinsi memiliki nilai antara 40-60. Atau dengan kata lain, pada Tabel 4 juga memperlihatkan dekomposisi indeks P4GN provinsi berdasarkan dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Provinsi yang memiliki nilai indeks P4GN di atas nilai P4GN nasional adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Berdasarkan indeks P4GN, kedua provinsi ini dinilai memiliki pelaksanaan kegiatan P4GN yang lebih baik secara nasional. Sementara itu, berdasarkan dimensi *supply reduction*, terdapat 6 provinsi yang memiliki nilai dimensi *supply reduction* di atas nilai dimensi *reduction* Indonesia. Artinya 8,8% dari total provinsi di Indonesia sudah melaksanakan kegiatan P4GN yang lebih baik dibanding nasional dilihat dari dimensi *supply reduction*. Sedangkan berdasarkan dimensi *demand reduction*, 2 provinsi memiliki nilai dimensi *demand reduction*. Dengan kata lain, 5,9% provinsi di Indonesia melaksanakan kegiatan P4GN yang lebih baik dibanding nasional berdasarkan dimensi *demand reduction*.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran dari pola dekomposisi di tiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 3. Pada Gambar 3 terlihat bahwa adanya kecenderungan kesamaan pola di setiap provinsi yaitu dimensi *supply reduction* memiliki nilai komponen indeks yang lebih kecil dibandingkan dengan *demand reduction*. Hal ini mengindikasikan bahwa di setiap provinsi, dalam menjalankan program P4GN lebih banyak ke arah dimensi *demand reduction* dibanding ke arah *supply reduction*-nya.



Gambar 3. Dekomposisi Indeks P4GN

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara indeks P4GN dengan dimensi *supply reduction* dan *demand reduction* yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan positif, yaitu ketika indeks *supply reduction* dan *demand reduction* meningkat, maka indeks P4GN juga meningkat.



Gambar 4. Hubungan Indeks P4GN dengan *Supply Reduction* (a) dan Hubungan Indeks P4GN dengan *Demand Reduction* (b)

Perbandingan dengan Indeks Sejenis

Untuk mengetahui rasionalisasi nilai Indeks P4GN yang telah disusun maka perlu dilakukan perbandingan Indeks P4GN dengan indeks lain yang memiliki konteks yang sama. Pada kajian ini, indeks yang dipilih sebagai perbandingan adalah indeks ketahanan nasional dan *Organized Crime Index Africa*. Kedua indeks tersebut memiliki tujuan yang serupa dengan Indeks P4GN, yaitu mengukur kinerja hasil kegiatan yang berhubungan dengan masalah ketahanan negara dalam mengatasi gangguan dan kejahatan yang terencana. Kedua indeks tersebut juga merupakan indeks komposit yang dihasilkan dengan metode yang hampir sama dengan metode penyusunan indeks P4GN.

Hasil perbandingan Indeks P4GN dengan Indeks Ketahanan Nasional dan *Organized Crime Index Africa* menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda antara satu indeks dengan indeks lain. Mengacu pada nilai skala, maka ketiga indeks tersebut berada di posisi tengah atau pada posisi moderat.

Tabel 5. Perbandingan Indeks P4GN dengan Indeks Ketahanan Nasional dan *Organized Crime Index Africa*

Nama Indeks	Nilai	Skala	Klasifikasi/Kriteria											
Indeks P4GN	53,14	1 - 100	1. Nilai Indeks < 40 = Kurang Efektif											
			2. $40 \leq$ Nilai Indeks < 60 = Cukup Efektif											
			3. $60 \leq$ Nilai Indeks < 80 = Efektif											
			4. Nilai Indeks $\geq$ 80 = Sangat Efektif											
Indeks Ketahanan Nasional	2,69	1 - 5	5. Sangat Tangguh											
			4. Tangguh											
			3. Cukup Tangguh											
			2. Kurang Tangguh											
			1. Rawan											
Organized Crime Index Africa	4,68	1 - 10	Criminality	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Non Existent To Little Influence			Moderate Influence		Significant Influence		Severe Influence			
			Resilience											
				Non Existent or Extremely Ineffective			Moderate Effective		Significant Effective		Highly Effective			

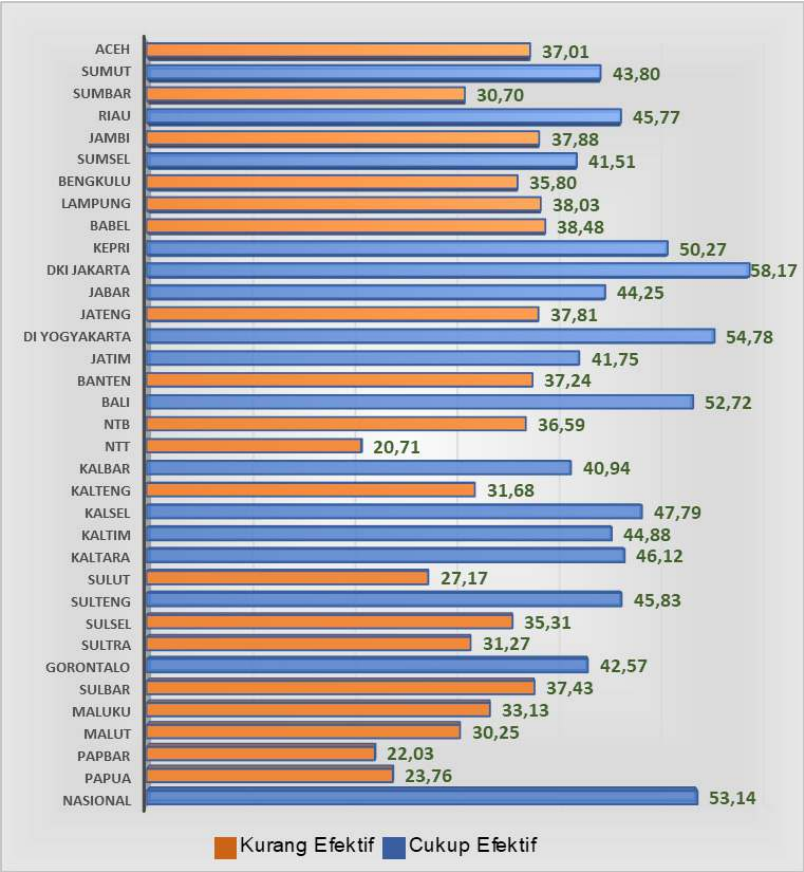
Klasifikasi nilai indeks dilakukan untuk memudahkan pemahaman kondisi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan oleh BNN. Penentuan klasifikasi indeks dilakukan berdasarkan efektivitas kegiatan P4GN. Indeks P4GN dinyatakan kurang efektif jika nilai indeks di bawah 40, artinya dari 100 kejadian kegiatan P4GN kinerja P4GN di bawah 40 persen yang efektif dilakukan. Intervensi BNN dalam kegiatan P4GN dinyatakan cukup efektif jika indeks P4GN berada antara 40-60 kurang, efektif jika indeks P4GN berada antara 60-80 kurang dan sangat efektif bila indeks P4GN 80 ke atas seperti terlihat pada Tabel 5. Kinerja BNN dalam kegiatan P4GN akan efektif jika dari 100 kejadian P4GN, BNN mampu menyelesaikan lebih dari 40 kejadian seperti terlihat pada Tabel 5 di atas.

C. Visualisasi Indeks P4GN Tingkat Nasional dan Provinsi

Visualisasi dalam sebuah kegiatan penelitian merupakan tahap yang penting dilakukan. Visualisasi bertujuan untuk mempermudah penyampaian hasil penelitian kepada audiens atau pembaca. Visualisasi

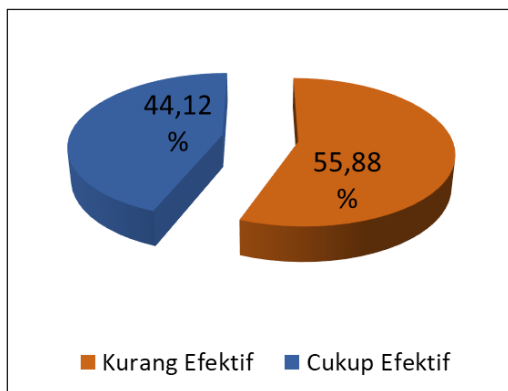
dilakukan dengan menyajikan hasil kajian dalam bentuk grafik dan diagram yang lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

Secara umum, sebaran Indeks P4GN Tahun 2020 di tingkat nasional maupun di 34 provinsi berada pada rentang nilai 20,71 sampai dengan 58,17. Hal ini bisa diartikan bahwa capaian dari pelaksanaan program P4GN masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa sebaran nilai Indeks dengan warna batang diagram biru adalah provinsi dengan nilai indeks P4GN minimal 40 dengan kategori Cukup Efektif. Sedangkan batang diagram dengan warna orange merupakan provinsi dengan nilai indeks kurang dari 40 atau dalam klasifikasi Kurang Efektif. Dan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki nilai indeks di atas nilai indeks P4GN Nasional.



Gambar 5. Indeks P4GN Menurut Provinsi Tahun 2020

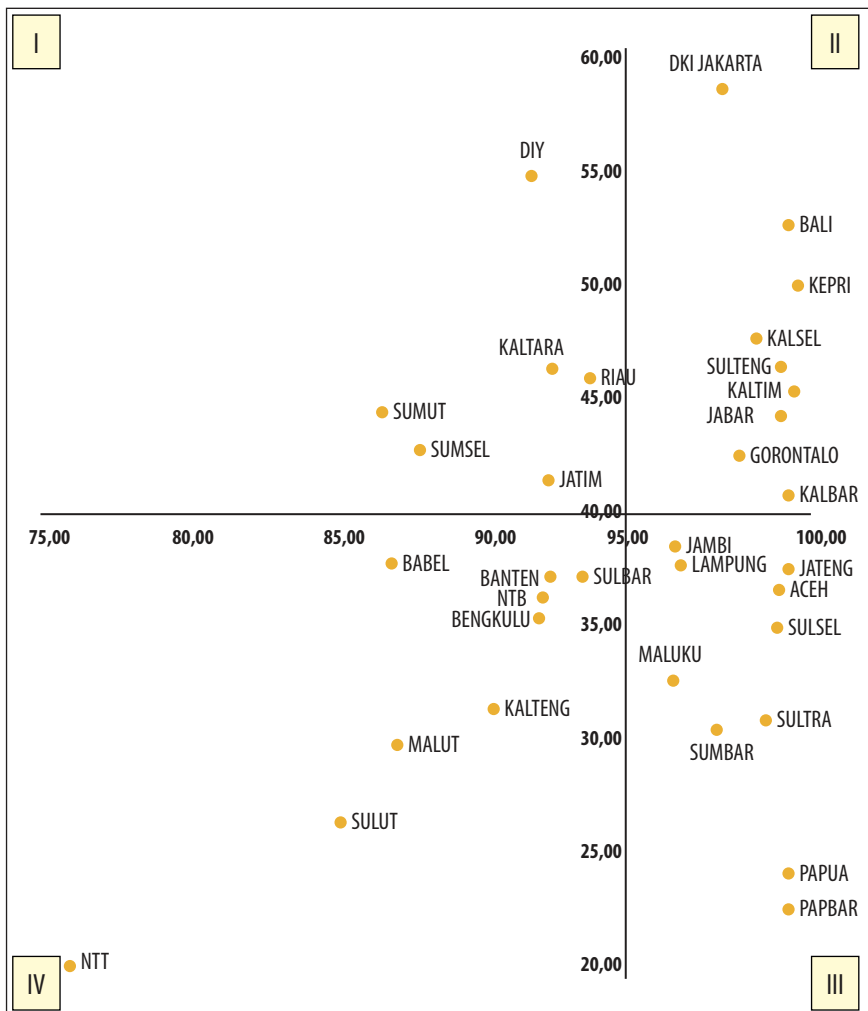
Selain itu, dari data tersebut juga diketahui bahwa 55,88 persen dari 34 provinsi memiliki nilai Indeks P4GN minimal 40 dengan kategori Cukup Efektif dan sebanyak 44,12 persen provinsi memiliki nilai indeks bawah 40 dengan klasifikasi Kurang Efektif seperti terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Provinsi berdasarkan Nilai dan Klasifikasi Indeks

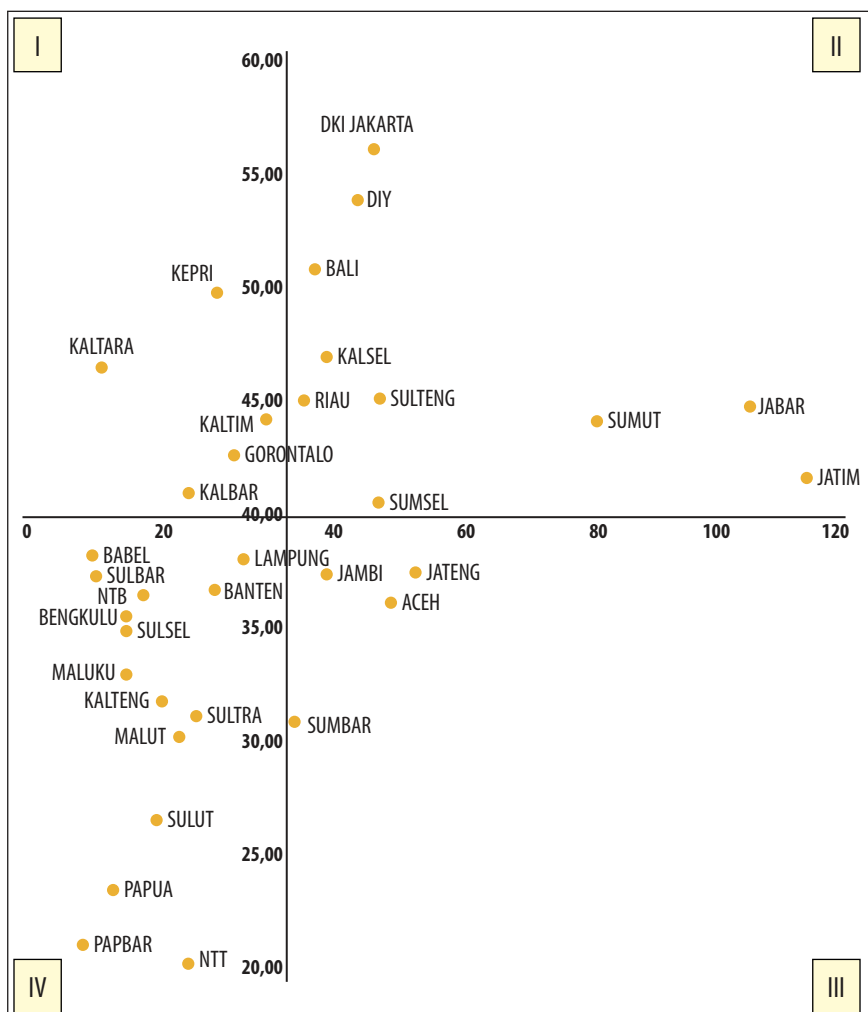
D. Hubungan antara Indikator dengan Indeks P4GN

Program P4GN merupakan program pemerintah yang didanai secara rutin untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Keberhasilan program P4GN tidak lepas dari kemampuan dan kapabilitas BNN dan *stakeholder* dalam merealisasikan anggaran program secara optimal dan tepat sasaran. Seluruh provinsi di Indonesia memiliki persentase penyerapan anggaran yang tinggi yaitu sebesar 95 persen. Hubungan persentase realisasi anggaran dengan nilai indeks P4GN per provinsi akan menarik jika digambarkan ke dalam 4 (empat) kuadran. Hubungan tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) kuadran. Realisasi anggaran tinggi (mendekati 100 persen) merupakan salah satu indikasi kinerja keuangan bahwa provinsi tersebut dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan pada awal tahun. Jadi dapat diasumsikan bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan nilai indeks di provinsi tersebut. Data hasil kajian menunjukkan bahwa pada kuadran II masih terdapat provinsi dengan persentase realisasi anggaran tinggi tetapi nilai indeksnya di bawah 40 dengan klasifikasi kurang efektif. Kondisi ini harus menjadi evaluasi bagi BNNP terkait dengan faktor yang menyebabkan kekuranganeftifan program P4GN yang dijalankan di wilayahnya.



Gambar 7. Hubungan Indeks P4GN dengan Persentase Realisasi Anggaran

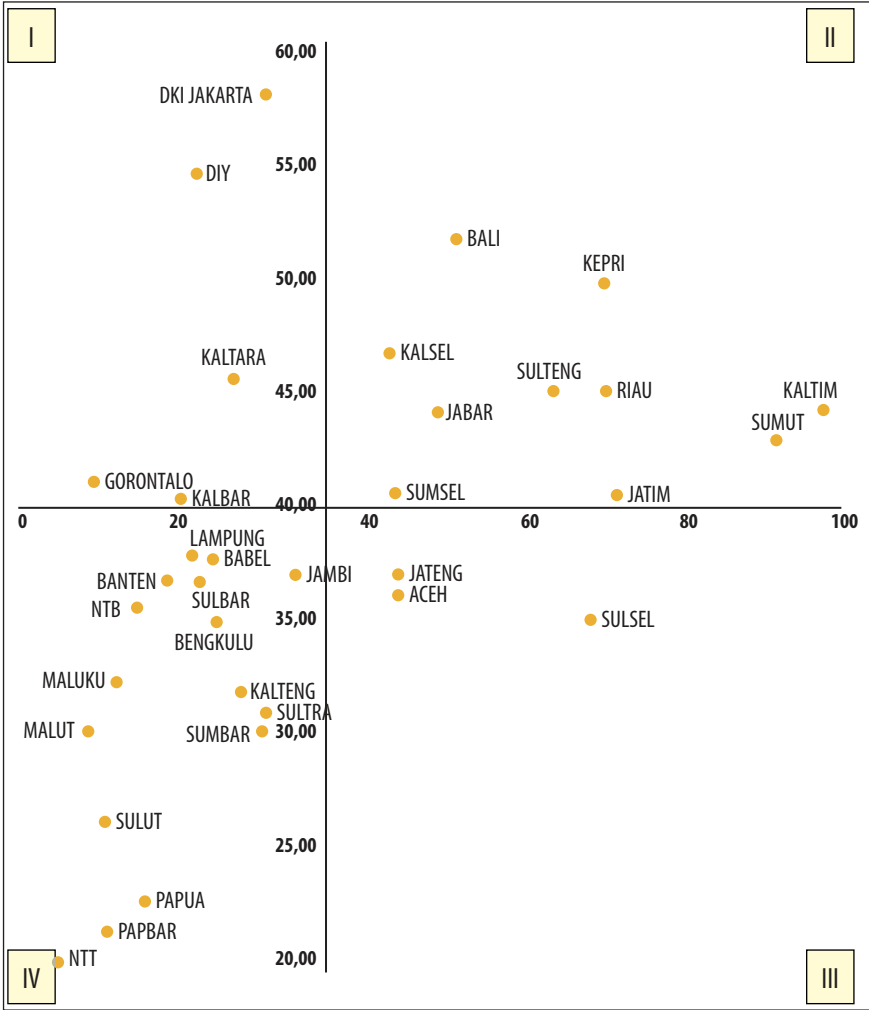
Seperti halnya program pemerintah lainnya, program P4GN akan efektif dilaksanakan jika didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan pada plotting kuadran indeks P4GN menurut provinsi terhadap variabel pengurangan produksi dalam hal ini adalah indikator persentase realisasi anggaran dan jumlah aparat pemberantasan. Pada Gambar 7 terlihat bahwa sebagian besar realisasi anggaran disetiap provinsi lebih dari 90 persen. Di kuadran I menunjukkan ada beberapa provinsi yang memiliki persentase realisasi anggaran di bawah 90 persen namun memiliki nilai indeks P4GN di atas 40.



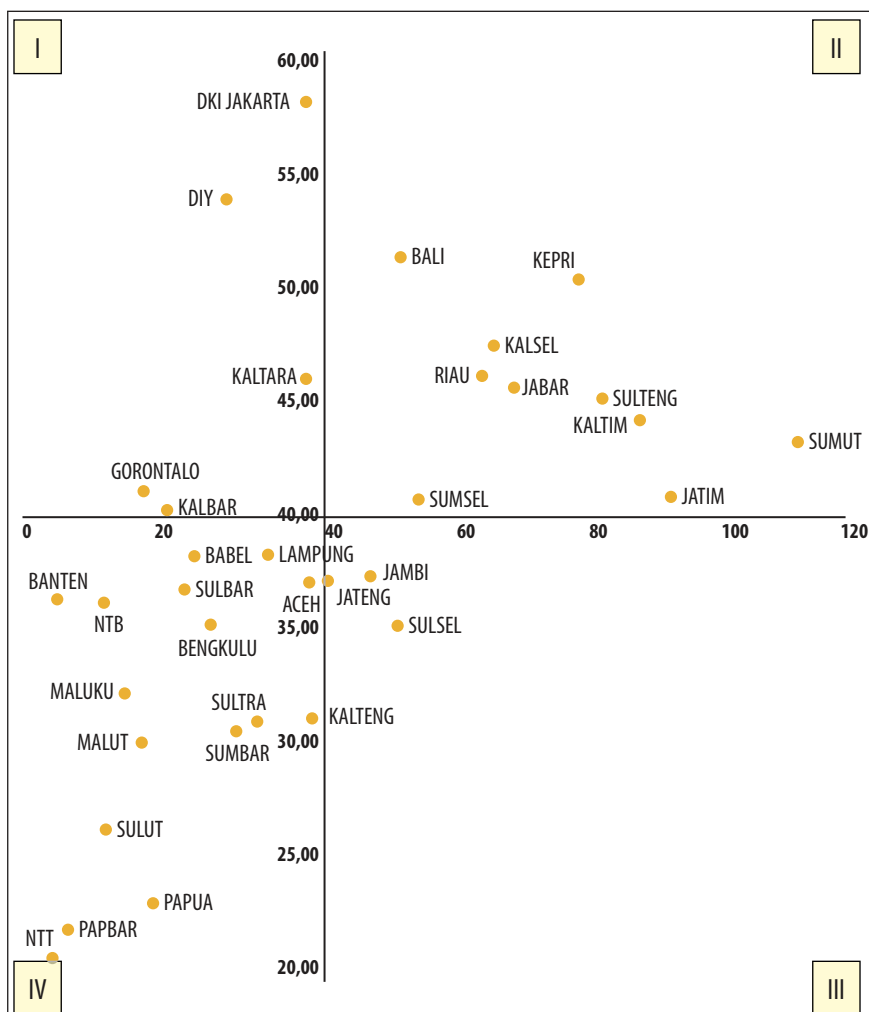
Gambar 8. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Aparat Pemberantasan

Jumlah aparat yang memadai merupakan penunjang supaya program P4GN berjalan lebih efektif. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih mengalami kendala kurangnya aparat pemberantasan sehingga mengakibatkan indeks P4GN hanya berada di level cukup efektif. Namun, seperti terlihat di kuadran III, terdapat beberapa provinsi yang memiliki jumlah aparat pemberantasan di atas rata-rata tetapi memiliki nilai indeks P4GN berada di bawah 40 seperti terlihat pada Gambar 8.

Kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu komponen penting pada dimensi *supply reduction* dalam penyusunan Indeks P4GN. Hal ini ditunjukkan dalam variabel pemutusan distribusi narkoba yang menggunakan indikator diantaranya adalah jumlah berkas perkara kasus peredaran narkoba dan jumlah tersangka kasus tindak pidana (Gambar 9 dan Gambar 10).



Gambar 9. Hubungan Indeks P4GN dengan Berkas Perkara Kasus Peredaran Narkoba

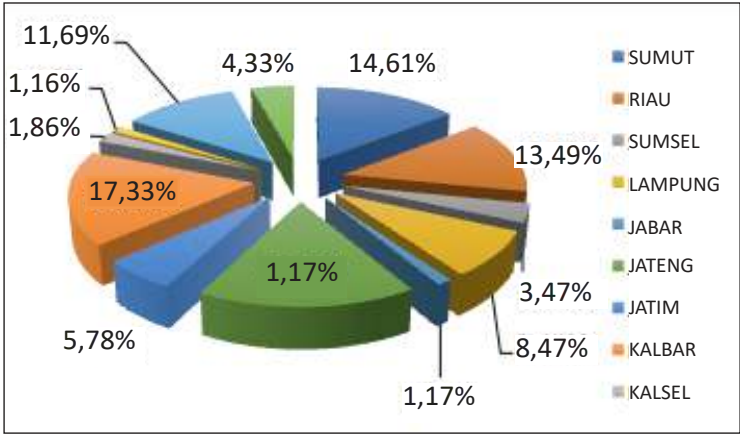


Gambar 10. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Tersangka Kasus Tindak Pidana

Pada Gambar 9 dan Gambar 10 terlihat di masing-masing kuadran III bahwa sebaran provinsi yang memiliki berkas perkara kasus peredaran narkoba dan jumlah tersangka kasus tindak pidana yang di atas rata-rata nasional tetapi memiliki nilai indeks P4GN di bawah 40. Provinsi yang memiliki berkas perkara kasus peredaran narkoba dalam jumlah banyak juga memiliki rata-rata indeks P4GN tinggi seperti Sumatera Utara dan Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah berkas perkara

paling banyak dan memiliki nilai indeks P4GN di atas 40. Sementara provinsi Sulawesi Selatan memiliki indeks P4GN di bawah 40 tetapi jumlah berkas perkara di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program P4GN diukur dari berbagai sisi secara menyeluruh sehingga membuka kesempatan adanya perbaikan kinerja pada indikator tertentu dalam hal ini adalah jumlah berkas perkara kasus peredaran narkoba yang merupakan hasil kegiatan pemberantasan pada program P4GN. Banyaknya kasus yang diungkap dan tersangka yang ditangkap menunjukkan kinerja program P4GN semakin meningkat. Banyaknya tangkapan berarti pula bahwa narkoba yang beredar di masyarakat akan berkurang. Hal ini akan berimplikasi bahwa program P4GN berhasil menekan peredaran narkoba di Indonesia.

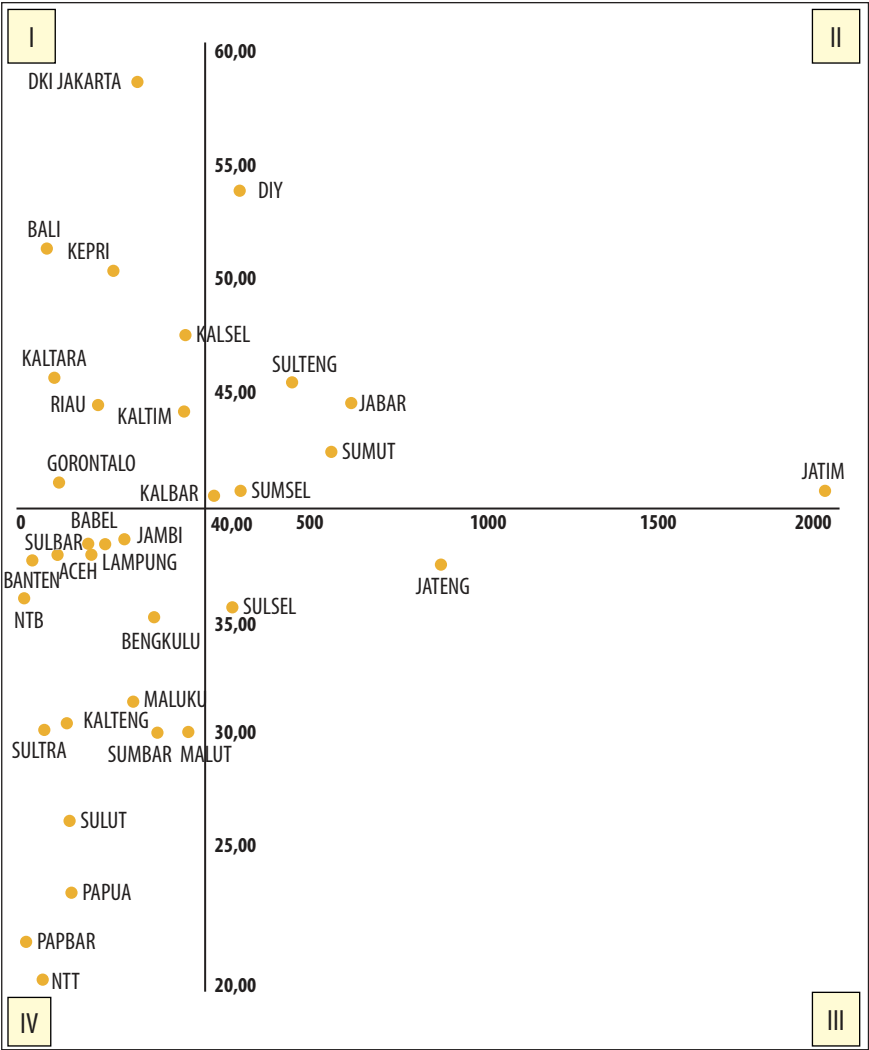
Indikator persentase nilai aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Tindak Pidana narkoba, merupakan indikator dalam variabel perampasan aset. Indikator ini hanya dimiliki 9 provinsi provinsi seperti ditunjukkan pada Gambar 11. Persentase nilai aset TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika terbesar adalah Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 17,1 persen dan yang terkecil adalah provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 1,16 persen.



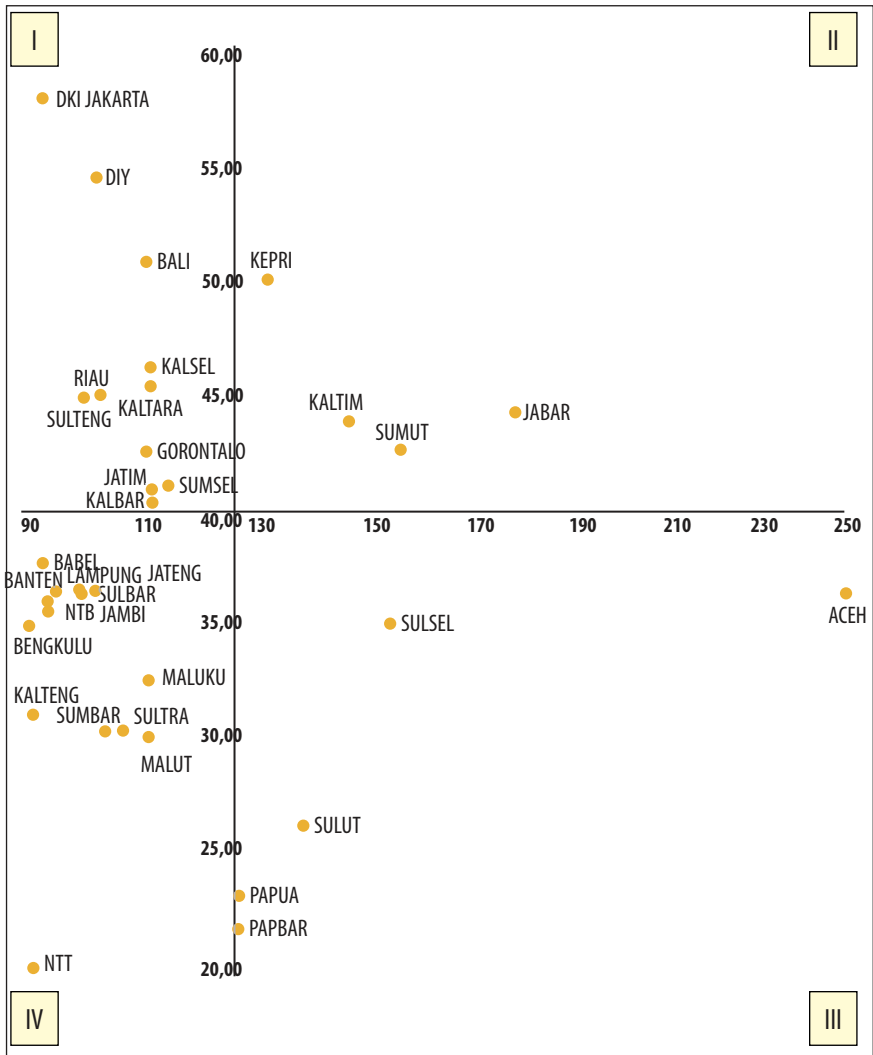
Gambar 11. Persentase Nilai Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika

Ketahanan personal merupakan salah satu variabel penyusun dimensi *demand reduction*. Beberapa provinsi memiliki kinerja tinggi dari sisi ketahanan komunal, dalam hal ini menggunakan indikator jumlah kegiatan

Direktorat Informasi dan Edukasi dan biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta tercermin dalam indeks (Gambar 11 dan Gambar 12). Beberapa provinsi yang memiliki jumlah kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi di atas rata-rata nasional namun memiliki nilai indeks P4GN masih di bawah 40 (Gambar 12), sehingga harus ditinjau kembali kelemahan yang memengaruhi kondisi tersebut. Terlihat di kuadran I, bahwa terdapat provinsi dengan biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bawah rata-rata nasional, namun memiliki nilai indeks P4GN di atas 40 (Gambar 13).

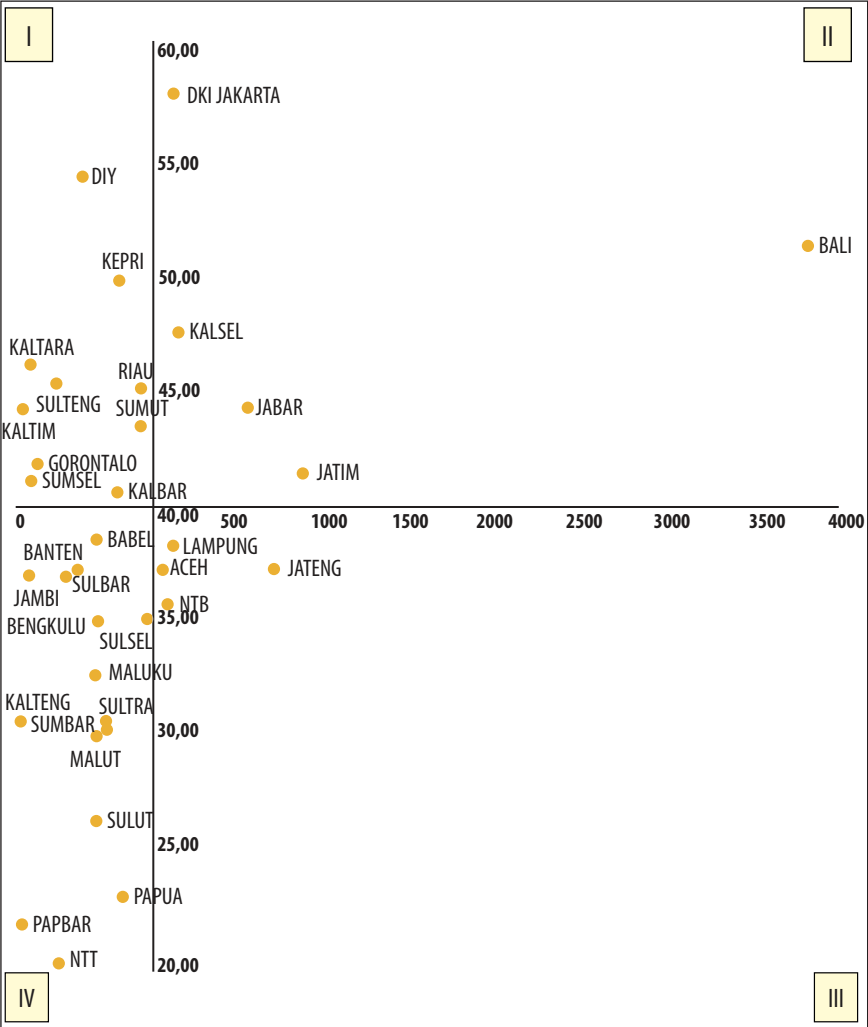


Gambar 12. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi



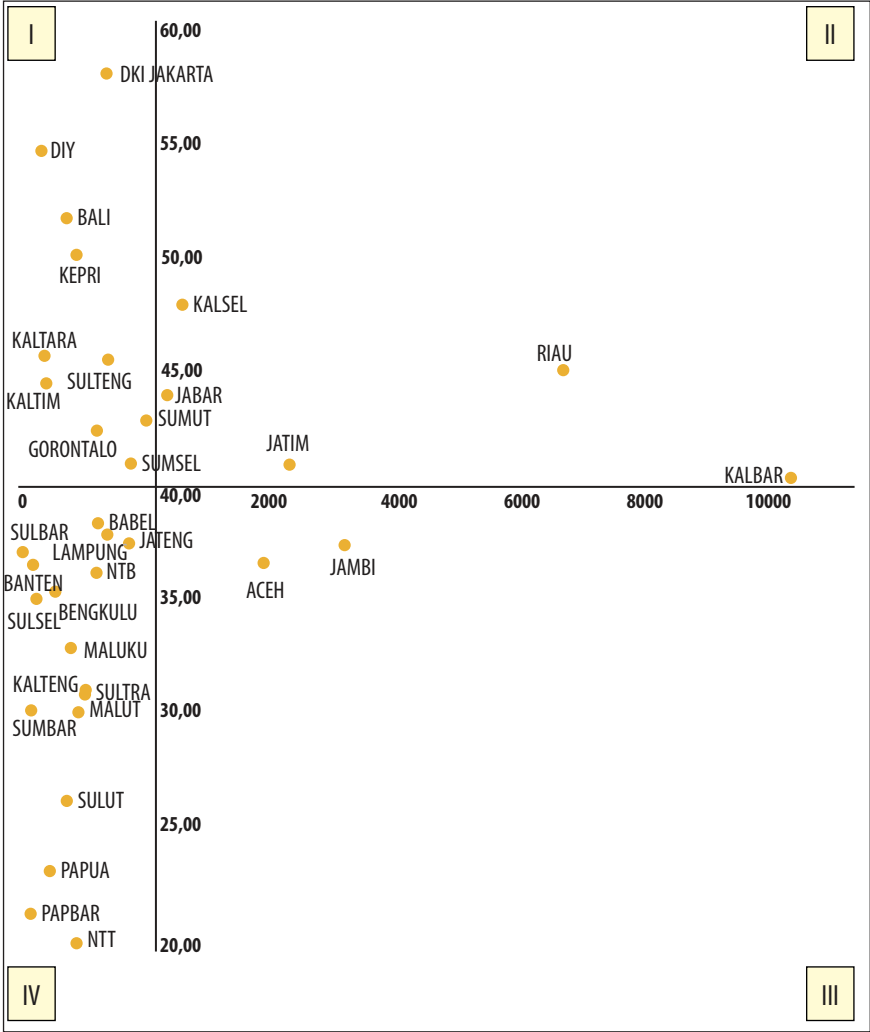
Gambar 13. Hubungan Indeks P4GN dengan Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memperkuat sisi *demand reduction*, adalah penting untuk memperhatikan penguatan ketahanan komunal (masyarakat). Hubungan antara Indeks P4GN dengan jumlah kegiatan bidang advokasi (Gambar 14). Pada kuadran II terlihat bahwa ada provinsi yang melakukan kegiatan bidang advokasi jauh melebihi kegiatan provinsi lain dan dalam pencapaian indeksnya berada di atas nilai 40. Jumlah SDM yang memadai merupakan kunci untuk kesuksesan memperkuat ketahanan komunal sehingga tiap elemen masyarakat memiliki ketahanan dari bahaya ancaman narkoba.



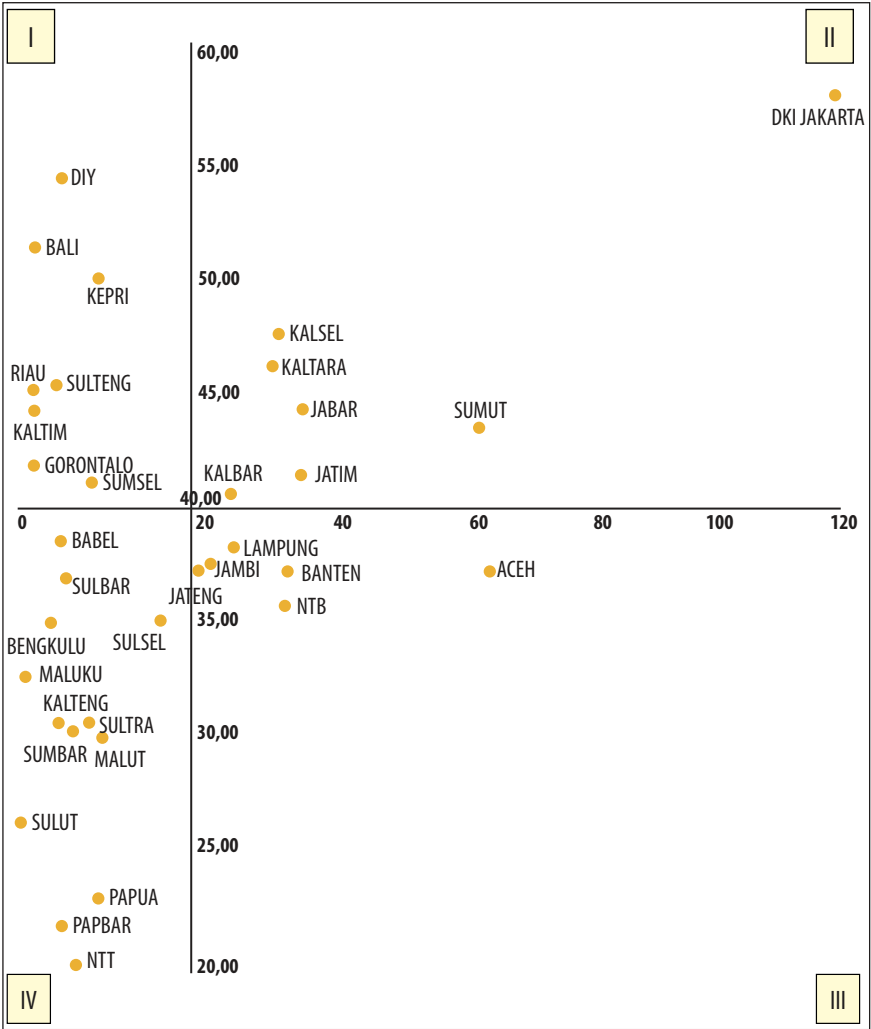
Gambar 14. Hubungan Hubungan Indeks P4GN dengan Kegiatan Bidang Advokasi

Jumlah penggiat anti narkoba dan relawan anti narkoba pada tahun 2019 menunjukkan bahwa secara total jumlah penggiat dan relawan di provinsi di Pulau Sumatera memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Hubungan antara Indeks P4GN dengan jumlah penggiat anti narkoba terlihat pada Gambar 15. Pada Kuadran IV terlihat sebagian besar provinsi memiliki jumlah penggiat anti narkoba di bawah nilai rata-rata nasional dan pencapaian nilai indeks P4GN-nya pun di bawah 40 (Gambar 14).



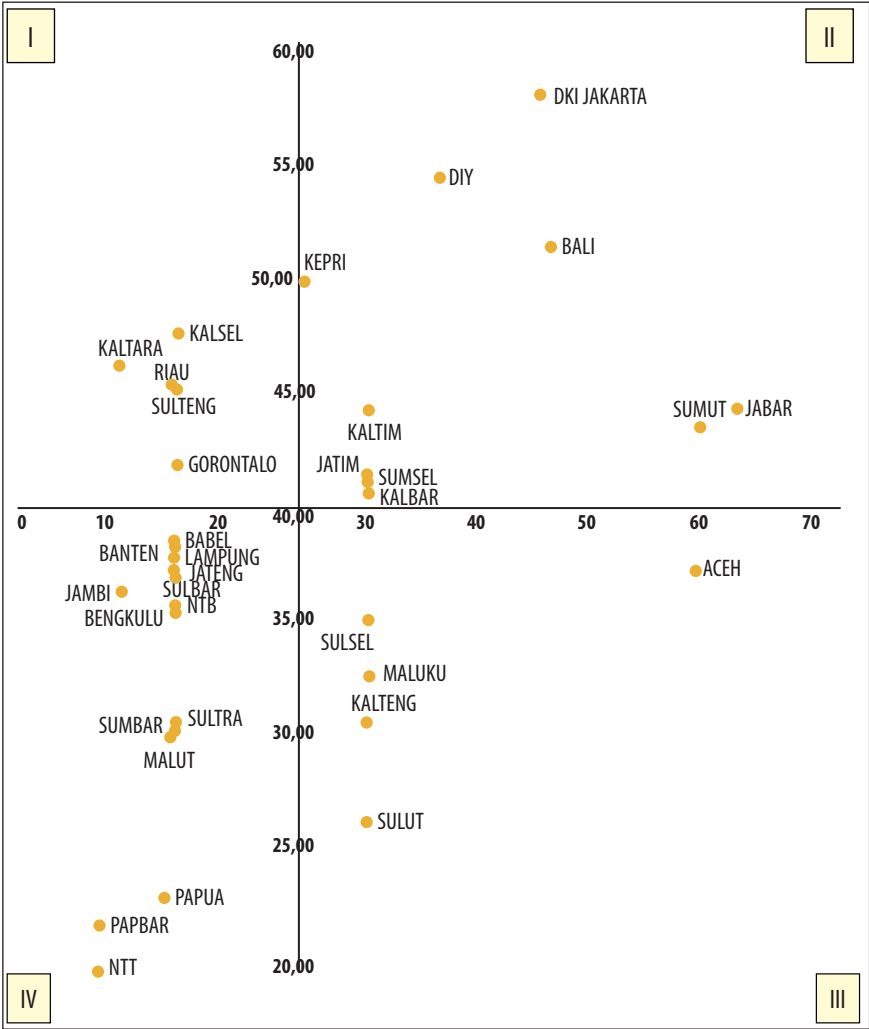
Gambar 15. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Penggiat Anti Narkoba

Pada indikator kawasan rawan narkoba yang merupakan variabel pemulihan kawasan rawan narkoba pada dimensi *demand reduction*, terdapat satu provinsi yang memiliki jumlah kawasan rawan paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta (Gambar 16) tetapi nilai Indeks P4GN pada provinsi tersebut di atas 40. Artinya, program P4GN telah berhasil mengidentifikasi kawasan rawan penyalahgunaan narkoba.



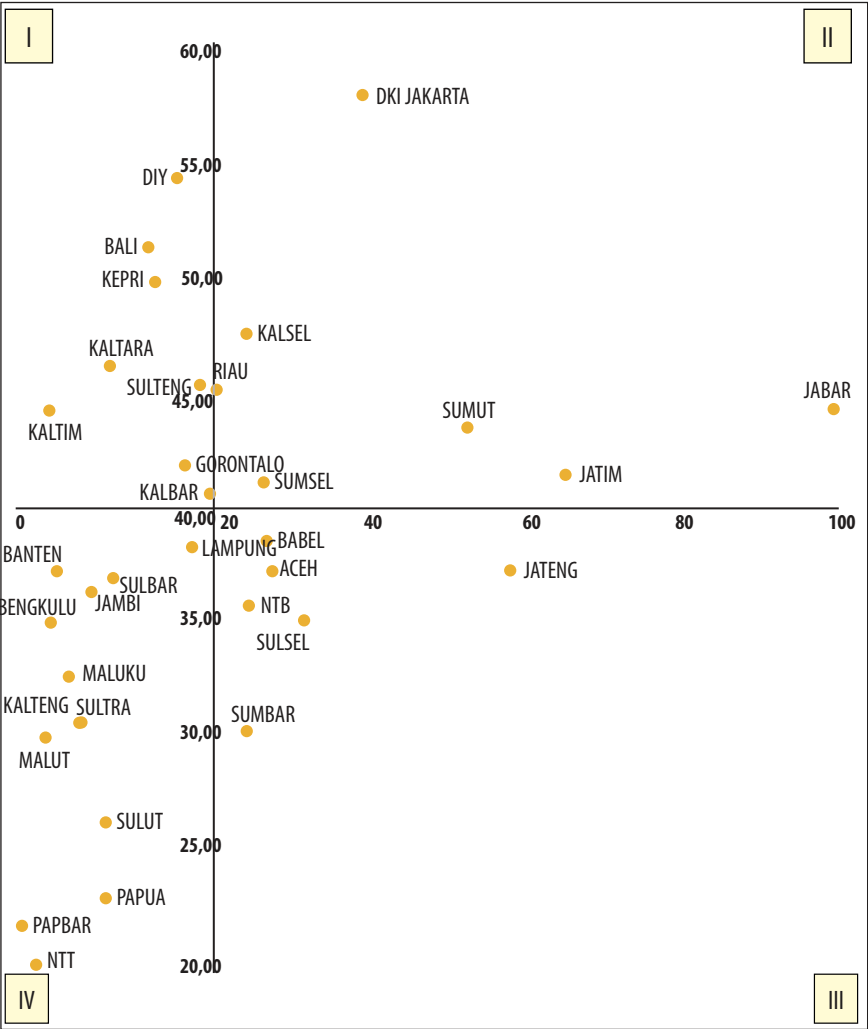
Gambar 16. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Titik Kawasan Rawan Narkoba

Adapun tindak lanjut setelah proses pengidentifikasian adalah untuk mengubah kawasan rawan menjadi kawasan aman. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan pemberdayaan alternatif. Hubungan antara Indeks P4GN dengan jumlah peserta kegiatan program pelatihan pemberdayaan alternatif. Pada kuadran III menunjukkan beberapa provinsi memiliki jumlah peserta kegiatan di atas rata-rata nasional namun pencapaian nilai indeksnya di bawah 40 (Gambar 17).



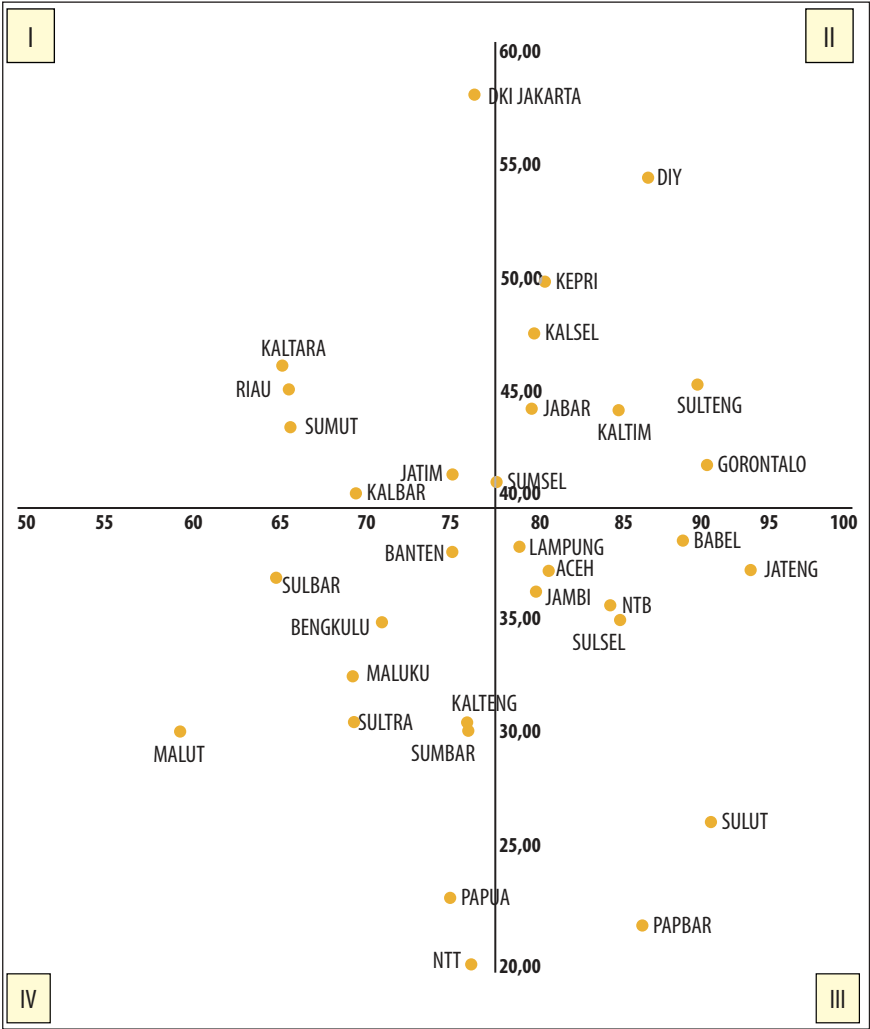
Gambar 17. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Peserta Kegiatan Program Pelatihan Pemberdayaan Alternatif

Penguatan program rehabilitasi merupakan salah satu variabel dalam dimensi *demand reduction*. Dua indikator dari variabel ini adalah jumlah fasilitas rehabilitasi yang terdapat keterlibatan BNN didalamnya dan penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah (khususnya BNNP). Hubungan kedua indikator tersebut dengan indeks P4GN terdapat dalam Gambar 18 dan Gambar 19.



Gambar 18. Hubungan Indeks P4GN dengan Jumlah Fasilitas Rehabilitasi yang ada Keterlibatan BNN dalam Pengelolaannya

Kuadran III memperlihatkan ada satu provinsi yaitu Jawa Tengah yang memiliki fasilitas rehabilitasi terbanyak namun pencapaian indeksnya masih berada di bawah 40 (Gambar 18). Kuadran I terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki penilaian standar pelayanan minimal dibawa rata-rata nasional namun pencapaian nilai indeksnya di atas 40 (Gambar 19).



Gambar 19. Hubungan Indeks P4GN dengan Penilaian Standar Pelayanan Minimal pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah (BNNP)

E. Tantangan dalam Penyusunan Indeks P4GN

Kegiatan kajian Indeks P4GN merupakan serangkaian kegiatan penelitian untuk menghasilkan angka dan metode perhitungan indeks yang sesuai di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut selain melakukan pengumpulan data sekunder, tim juga melaksanakan FGD untuk menjajaki kemungkinan perhitungan Indeks P4GN dengan menggunakan data hasil pelaksanaan kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

P4GN merupakan program prioritas penanggulangan masalah narkoba di Indonesia. Seperti diketahui bahwa narkoba merupakan masalah yang kompleks, sehingga penanganannya multidimensi dan melibatkan banyak instansi dan komponen masyarakat.

Adapun hasil FGD di 8 (delapan) provinsi ditemukan sebagai berikut:

Kondisi pelaksanaan Program P4GN oleh BNNP.

1. BNNP sebagai *vocal point* P4GN mampu melakukan koordinasi dengan SKPD. Hal tersebut ditunjukkan dengan keaktifan SKPD dalam kegiatan P4GN. Belum semua provinsi mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional P4GN menjadi Rencana Aksi Daerah P4GN.
2. Data kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh BNN dilaporkan ke pusat secara berkala melalui aplikasi Sistem Informasi Narkotika (SIN) dan Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA).

Kondisi pelaksanaan Program P4GN oleh instansi terkait:

1. Kegiatan P4GN di tingkat provinsi belum berjalan seragam seperti yang diharapkan, kegiatan yang banyak dijalankan oleh SKPD hanya sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine.
2. Adanya pandangan bahwa penanganan masalah narkoba di Indonesia semata merupakan tanggung jawab BNN, sehingga ada kecenderungan instansi/ lembaga enggan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan P4GN.

3. Belum adanya rumusan atau alokasi anggaran khusus terkait dengan kegiatan P4GN, dikarenakan kegiatan P4GN merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh BNN sebagai *vocal point*.
4. SKPD memandang *supply reduction* dan *demand reduction* merupakan kegiatan yang masuk dalam lingkup program P4GN yang identik dengan program kerja BNN. Kondisi ini mengakibatkan para peserta yang berasal dari instansi terkait cenderung enggan dan tidak paham mengenai prioritas kegiatan P4GN dari sisi *supply reduction* atau *demand reduction*.
5. Adanya perbedaan kategori pendataan hasil pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh BNN, Polri dan lembaga penegak hukum lainnya. Pendataan Polri biasanya melakukan pendataan berdasarkan Pasal yang dipersangkakan serta karakteristik demografis pelaku seperti usia, jenis kelamin dan karakteristik lainnya. Berbeda dengan BNN yang melakukan pendataan tidak pidana narkoba berdasarkan jaringan dan jenis barang bukti.

Kondisi data pelaksanaan P4GN secara umum, yaitu:

1. Kondisi data hasil pelaksanaan P4GN yang masih berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, mulai dari manual sampai dengan pemanfaatan sistem berbasis *online*.
2. Belum terintegrasinya data hasil pelaksanaan P4GN antara BNN dan instansi terkait, menyebabkan sulitnya melihat keberhasilan pelaksanaan P4GN di tingkat daerah.

Kondisi pelaksanaan dan kondisi data di atas menjadi tantangan bagi BNN untuk merumuskan Indeks P4GN sebagai salah satu ukuran keberhasilan penanganan masalah narkoba di Indonesia. Keterukuran tersebut harus diidentifikasi kembali apakah akan diukur sebagai keberhasilan BNN atau sebagai keberhasilan seluruh lembaga. Berdasarkan analisis kondisi data hasil diskusi di atas, diketahui bahwa data hasil pelaksanaan P4GN masih sangat beragam dan minim, sehingga jika akan diukur keberhasilan secara global harus dilakukan sistem pendataan terstandar dan terintegrasi.





BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN



SELAMAT TINGGAL **NARKOBA**

TINGGALKAN NARKOBA SEJAUH MUNGKIN !!!
UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

A. Kesimpulan

1. Indikator penyusun Indeks P4GN tahun 2020 mewakili dimensi *supply reduction* dan *demand reduction* karena sudah memuat aspek perspektif (*input*, proses dan *output*) dan bidang kegiatan (pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi).
2. Penghitungan Indeks P4GN Tahun 2020 menggunakan penimbang proporsional (*proportional weighted*) yang berarti bahwa setiap dimensi memiliki kepentingan dan prioritas yang sama di dalam pelaksanaan program P4GN.
3. Hasil penghitungan Indeks P4GN Tahun 2020 menunjukkan bahwa Program P4GN tahun 2020 termasuk klasifikasi Cukup Efektif. Indeks P4GN di tingkat provinsi, juga menunjukkan 15 dari 34 provinsi termasuk dalam klasifikasi Cukup Efektif.

B. Rekomendasi

1. Penghitungan Indeks P4GN memerlukan dukungan data yang komprehensif mengenai seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk itu diperlukan sistem data yang konsisten dan terintegrasi guna menunjang kecepatan penghitungan indeks dan analisis kebijakan program P4GN ini.
2. Indeks P4GN merupakan indeks yang memiliki keberartian apabila penghitungannya dilakukan secara rutin sehingga bisa dibandingkan dan dijadikan penilaian mengenai kinerja program P4GN. Indikator-indikator terpilih dalam Indeks P4GN tahun

2020 harus tetap dipertahankan ketersediaan datanya untuk kelanjutan penyusunan Indeks P4GN di tahun berikutnya.

3. Hasil Indeks P4GN tahun 2020 menunjukkan hasil cukup efektif yang dapat diartikan bahwa masih diperlukannya peningkatan kinerja di setiap indikator. Sebagai contoh, pada variabel perampasan aset yang memiliki nilai skor per indikator terendah.
4. Indeks P4GN tahun 2020 menggunakan penimbang yang sama dengan asumsi bahwa setiap dimensi memiliki prioritas yang sama. Pemberian bobot setiap dimensi ini dapat diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan prioritas yang ditetapkan.
5. Pembangunan Indeks P4GN memerlukan indikator keberhasilan ataupun target dari setiap kegiatan yang digunakan sebagai acuan skor nilai penyusun Indeks P4GN.
6. Perlunya dilakukan pengumpulan data melalui survei untuk diketahui dampak langsung dari pelaksanaan program P4GN yang dirasakan masyarakat.

- Bjarnason, T., Steriu, A., & Kokkevi, A. (2010). Cannabis Supply and Demand Reduction: Evidence from the ESPAD Study of Adolescents in 31 European Countries. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 123-134.
- Buxton, J. (2015). *Drugs and Development : The Great Disconnect*. In *Policy Report 2* (Issue 2).
- Ciccarone, D. (2019). The triple wave epidemic: Supply and demand drivers of the US opioid overdose crisis. *International Journal of Drug Policy*, 71, 183–188. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.01.010>
- Emathzone, 2020, Index numbers and Types of Index Numbers, diakses dari <https://www.emathzone.com/tutorials/basic-statistics/index-numbers-and-types-of-index-numbers.html>
- European Commission, 2015, Technical Handbook On The Monitoring And Evaluation Framework Of The Common Agricultural Policy 2014 – 2020 diakses dari <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=21095&no=3>
- George A Kelley and Kristi S Kelley, 2012, Statistical models for meta-analysis: A brief tutorial diakses dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145560/>
- Global Commission on Drug Policy. (2011). *War on Drugs: Report of the Global Commission on Drug Policy*. Vol. June. [https://doi.org/10.1016/S0262-4079\(13\)60100-1](https://doi.org/10.1016/S0262-4079(13)60100-1)
- Hanson, G., Venturelli, P. J., & Fleckenstein, A. E. (2018). *Drugs and Society*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning
- Hartnoll, Richard. 1990. *A Framework for Evaluating Activities to Reduce the Demand for Drugs in Europe*. Gaceta Sanitaria. Elsevier.
- Helly Prajitno Soetjipto, 1995, Aplikasi Meta Analisis Dalam Pengujian Validitas Item, diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/13392>

- Holder, H. D., Gruenewald, P. J., Ponicki, W. R., Treno, A. J., Grube, J. W., Saltz, R. F., Voas, R. B., Reynolds, R., Davis, J., Sanchez, L., Gaumont, G., & Roeper, P. 2000 Effect of community-based interventions on high-risk drinking and alcohol related injuries. *Journal of the American Medical Association*, 284(18), 2341-2347.
- INCB, R. (2004). I. Integration of Supply and Demand Reduction Strategies : Moving Beyond A Balanced Approach. 1–10.
- Institute Burnet. (n.d.). Fact Sheet: Supply , Demand & Harm Reduction. The Centre for Harm Reduction.
- JICA, 2005, Monitoring And Evaluation Guidelines - For Better Management Of Development Project Monitoring. Diakses dari <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11836723.pdf>
- Kilmer, B., & Hoorens, S. (2010). Understanding Illicit Drug Markets, Supply-Reduction Efforts, and Drug-Related Crime in the European Union. <https://doi.org/10.7249/tr755>
- McSweeney, T., Turnbull, P. J., & Hough, M. (2008). Tackling Drug Markets and Distribution Networks in the UK. 30–31. <https://doi.org/978-1-906246-06-8>
- Melis, M., & Nougier, M. (2012). IDPC Briefing Paper Drug Policy and Development How Action Against Illicit Drugs Impacts on the Millennium Development Goals. SSRN Electronic Journal, June, 1–13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1909924>
- OECD and European Commission, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide, diakses dari: <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>
- Office of National Drug Control Policy. (2007). National Drug Control Strategy. National Drug Control Strategy, February, 1–206. <https://doi.org/10.4135/9781412964500.n209>

- Office of National Drug Control Policy. (2020). National Drug Control Strategy.
- Pentz, M. A., Bonnie, R. J., & Shopland, D. R. (1996). Integrating Supply and Demand Reduction Strategies for Drug Abuse Prevention. *American Behavioral Scientist*, 39(No.7).
- Reuband, K.-H. (1998). Drug Policies and Drug Prevalence: The Role of Demand and Supply. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 6, 321–336. <https://doi.org/10.1023/A>
- Saxe L, Kadushin C, Tighe E, Andrew A. Beveridge, David Livert, Archie Brodsky, David Rindskopf. 2006. Community-Based Prevention Programs In The War On Drugs: Findings From The “Fighting Back” Demonstration. *The Journal Of Drug Issues*: 263-294.
- Supranto J. 2009, *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2 Edisi 7*. Jakarta: Erlangga
- UNDP. (2015). Perspectives on the Development Dimensions of Drug Control Policy UNDP. March.
- Wagenaar, A. C., Murray, D. M., & Toomey, T. L. 2000. Communities Mobilizing for Change on Alcohol (CMCA): Effects of A Randomized Trial on Arrests and Traffic Crashes. *Addiction*, 95, 209-217.
- Wan, W. Y., Weatherburn, D., Wardlaw, G., Sarafidis, V., & Sara, G. (2014). Supply-side reduction policy and drug-related harm. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 486.
- Weatherburn D & Lind B 1997. The Impact of Law Enforcement Activity on A Heroin Market. *Addiction* 93(5): 557–569.
- Werb, D., Kerr, T., Nosyk, B., Strathdee, S., Montaner, J., & Wood, E. (2013). The Temporal Relationship Between Drug Supply Indicators: An Audit of International Government Surveillance Systems. *BMJ open*.

- Adiksi** : Kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat.
- Clandestine Lab** : Pabrik gelap yang digunakan sebagai tempat pembuatan atau produksi narkoba.
- Dekomposisi** : Proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana; penguraian. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan pencapaian nilai indeks komposit pada suatu daerah berdasarkan indikator yang terbentuk.
- Denominator** : Penyebut; angka dalam pecahan yang menunjukkan pembagiannya
- FGD** : *Focus Group Discussion*, digunakan untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu tema dengan tujuan menemukan makna menurut pemahaman kelompok.
- Indeks** : Metode pengukuran atas kinerja suatu set data *composite* (gabungan)
- Imputasi** : Mengisi data hilang dengan nilai yang diperkirakan cukup layak dan kemudian dianalisis dengan metode baku untuk data lengkap
- KIE** : Komunikasi Informasi dan Edukasi
- LKIP** : Laporan kinerja instansi pemerintahan
- Leading sector** : Sektor pemimpin yang berperan sebagai penggerak sektor-sektor lainnya.
- Narkoba** : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- Normalisasi** : Proses membuat data indikator menjadi normal, terutama untuk menyesuaikan dengan standar atau norma sehingga mudah dibandingkan.

OEDC	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i> , adalah organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. OECD mengeluarkan handbook yang berisi seperangkat pedoman teknis yang dapat membantu dalam pembangunan komposit indikator.
Pembobotan	: Faktor yang ditetapkan ke angka dalam penghitungan, seperti dalam menentukan rata-rata, untuk menambah atau mengurangi efek angka pada penghitungan, yang mencerminkan kepentingannya.
P4GN	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
<i>Stakeholder</i>	: Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
SIN	: Sistem Informasi Narkoba
SIRENA	: Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TP	: Tindak Pidana
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang

Tim BNN:

1. Drs. Heru Winarko
2. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H., Ph.D
3. Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.
4. Sri Haryanti, S.Sos., M.Si.
5. Sri Lestari, S.Kom., M.Si.
6. Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si.
7. Erma Antasari, S.Si.
8. Novita Sari, S.Sos., M.H.
9. Armita Eki Indahsari, S.Si.
10. Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.
11. Tri Tjahyono, S.Sos, M.Si
12. Hendrajid Putut Widagdo, S.Sos, M.M, M.Si
13. Dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si
14. Mahfud Syahrudin Latif, S.Sos
15. Yulianto Soelistyo, S.Kom., M.Si.

Tim STIS:

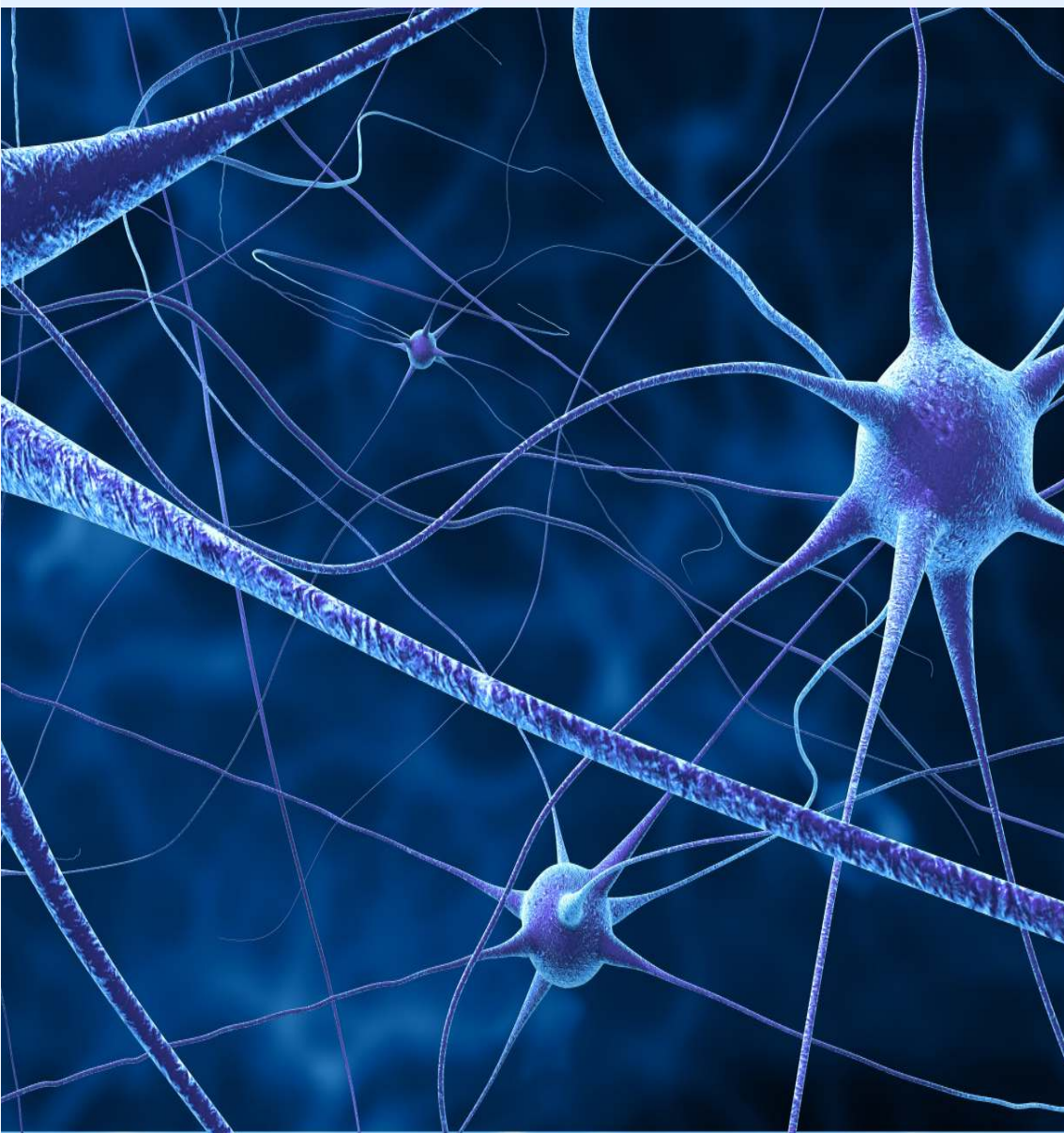
1. Dr. Erni Tri Astuti M.Math.
2. Dr. Hardius Usman, M.Si.
3. Dr. Nasrudin
4. Achmad Prasetyo, B.St., S.Si, M.M.
5. Anugerah Karta Monika, S.Si., M.E.
6. Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si., M.Sc., Ph.D.
7. Siskarossa Ika Oktora, S.ST., M.Stat.

Tim FKM UI:

1. Purwa Kurnia Sucahya, S.KM, M.Si.
2. Mona Lisa, S.KM, M.KM.
3. Enrika Rahayu Setyani, S.Gz.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Tabel Definisi Operasional

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Supply Reduction	Pengurangan Produksi	Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan dibagi jumlah provinsi	Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan
		Luas lahan tanaman ganja dimusnahkan	Luas lahan tanaman ganja yang berhasil dimusnahkan dalam satu tahun terakhir dibagi luas hutan Indonesia
		Penyelidikan lokasi lahan tanaman narkotika	Jumlah lokasi penanaman ganja yang berhasil diungkap dalam satu tahun terakhir dibagi jumlah provinsi
		Aparat bertugas pemberantasan narkoba	Jumlah kabupaten dan kota dibagi jumlah personel BNN yang bertugas dalam pemberantasan narkoba pada tahun indeks dihitung (BNNP & BNNK)
		Persentase realisasi anggaran kegiatan pemberantasan narkoba	Persentase realisasi anggaran kegiatan pemberantasan narkoba
		Senjata untuk aparat pemberantasan narkoba	Jumlah aparat pemberantasan narkoba dibagi jumlah senjata yang dialokasikan untuk aparat pemberantasan narkotika
		Kasus yang diterima rutan BNN	Jumlah kasus yang diterima rutan BNN dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan tahanan (Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti) dibagi jumlah tersangka
		Tersangka yang diterima rutan BNN	Jumlah tersangka yang diterima rutan BNN dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan tahanan (Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti) dibagi jumlah provinsi dibagi 100
		Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	Jumlah lembaga pemasyarakatan / penjara khusus bagi terpidana kasus tindak pidana narkotika
		Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	Kapasitas lembaga pemasyarakatan / penjara khusus bagi terpidana kasus tindak pidana narkotika dibagi jumlah provinsi dibagi kapasitas ideal per provinsi

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
	Pemutusan Distribusi	Berkas Perkara Kasus Peredaran Narkotika	Jumlah berkas perkara peredaran narkotika yang ada dalam setahun terakhir dibagi jumlah barang bukti
		Barang Bukti Narkotika	Jumlah barang bukti yang ditemukan dalam satu tahun terakhir (satuan jumlah item)
		Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkotika
		Tersangka kasus tindak pidana narkotika	Jumlah tersangka kasus tindak pidana narkotika
		Peta jaringan hasil penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan
		Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat memengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan
	Perampasan Aset	Berkas Perkara Penyidikan TPPU Hasil TP Narkotika	Jumlah berkas perkara TPPU P21 dalam satu tahun terakhir
		Tersangka TPPU Hasil TP Narkotika	Jumlah tersangka kasus TPPU dalam satu tahun terakhir
		Nilai Aset TPPU Narkotika	Rata-rata nilai aset perkara TPPU yang berhasil disita dari tiap tersangka dalam satu tahun terakhir
<i>Demand Reduction</i>	Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal	Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika
		Penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN
		Jumlah kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi (Media Cetak, Penyiaran, dan Online)	Kegiatan yang meliputi kegiatan Informasi (penyediaan konten baik online maupun offline) dan Edukasi (kegiatan tatap muka) dibagi jumlah provinsi dibagi 300
		Sebaran kegiatan KIE	Jumlah sebaran kegiatan KIE Bidang Informasi dalam satu tahun terakhir per 100 juta penduduk
		Jumlah jabatan fungsional untuk penyuluh narkotika dan penggerak swadaya masyarakat	Jumlah jabatan fungsional penyuluh narkotika (BNNP & BNNK)

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
		Biaya kegiatan KIE	Sumber biaya kegiatan KIE, selama ini ada 2 (dua) yaitu dari DIPA dan Non-DIPA
		Biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Sumber biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, selama ini ada 2 (dua) yaitu dari DIPA dan Non-DIPA
	Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat)	Indeks Kemandirian Masyarakat dalam P4GN	Ukuran partisipasi masyarakat (lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat) dalam melaksanakan program P4GN yang telah diberikan bimbingan teknis P4GN. Jika semakin besar skornya, maka semakin baik Indeks Kemandirian Masyarakatnya
		Institusi/ lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba
		Kegiatan Bidang Advokasi	Kegiatan yang bersifat aktif melibatkan <i>stakeholder</i> untuk bersinergi dengan BNN dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terkonsentrasi untuk lingkungan internal dan eksternal
		Peserta kegiatan KIE Bidang Advokasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KIE Bidang Advokasi dalam satu tahun terakhir
		Peserta kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh BNNP	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh BNNP dalam satu tahun terakhir
		Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Anti Narkoba
		Penggiat anti narkoba	Jumlah anggota yang mendaftar menjadi penggiat anti narkoba
		Relawan anti narkoba	Jumlah anggota yang tergabung dalam relawan anti narkoba
	Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba	Prevalensi Pernah Pakai Narkoba	Persentase penduduk yang pernah memakai narkoba tanpa merujuk referensi waktu pakainya dikaitkan dengan besar populasi

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
		Prevalensi Setahun Pakai Narkoba	Persentase penduduk yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir dikaitkan dengan besar populasi
		Titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif	Jumlah titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif dibagi jumlah titik kawasan narkoba
		Jumlah peserta kegiatan program pelatihan pemberdayaan alternatif	Jumlah orang yang mengikuti program pelatihan pemberdayaan alternatif dibagi jumlah titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif
		Titik kawasan rawan narkoba	Jumlah titik kawasan narkoba
	Penguatan Program Rehabilitasi	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi (Instrumen Mutu Layanan BNSP)	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi merupakan pengukuran kualitas layanan rehabilitasi sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi yang diukur dengan instrumen mutu layanan BSN
		Penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah (BNNP)	Penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah (BNNP). Jika semakin mendekati 100, maka semakin memenuhi standar yang telah ditetapkan
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi instansi pemerintah	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi komponen masyarakat	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat
		Jumlah fasilitas rehabilitasi yang ada keterlibatan BNN dalam pengelolaannya	Jumlah fasilitas rehabilitasi di provinsi yang memiliki keterlibatan BNN dalam pengelolaannya
		Jumlah fasilitas rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN	Jumlah fasilitas rehabilitasi di provinsi yang memiliki keterlibatan BNN dibagi jumlah fasilitas rehabilitasi di provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN dalam bentuk penguatan, dorongan, maupun fasilitas

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
		Jumlah klien rehabilitasi rawat jalan & rawat inap di fasilitas rehabilitasi BNN (BNNP, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi)	Jumlah fasilitas rehabilitasi di provinsi yang memiliki keterlibatan BNN dibagi jumlah klien rehabilitasi rawat jalan & rawat inap di fasilitas rehabilitasi BNN (BNNP, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi)
		Fasilitas layanan pasca rehabilitasi	Jumlah fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan layanan pasca rehabilitasi dibagi jumlah fasilitas
		Klien layanan pasca rehabilitasi	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pasca rehabilitasi

Lampiran 2. Tabel Hasil Uji Validitas

NO	INDIKATOR	KODE INDIKATOR	VALID/TIDAK VALID (sig > 0.05)
1	Titik lokasi lahan tanaman ganja dimusnahkan	S2	Valid
2	Luas lahan tanaman ganja dimusnahkan	S3	Valid
3	Penyelidikan lokasi lahan tanaman narkotika	S8	Valid
4	Aparat bertugas pemberantasan narkoba	S9	Valid
5	Persentase realisasi anggaran kegiatan pemberantasan narkoba	S10	Valid
6	Senjata untuk aparat pemberantasan narkoba	S11	Valid
7	Rumah tahanan	S12	Tidak valid
8	Kasus yang diterima rutan BNN	S12a	Valid
9	Tersangka yang diterima rutan BNN	S12b	Valid
10	Lembaga Pemasyarakatan	S13	Tidak valid
11	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	S14	Valid
12	Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	S15	Valid
13	Berkas perkara kasus peredaran narkotika	S16	Valid
14	Barang bukti narkotika	S17	Valid
15	Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba	S19	Valid
16	Tersangka kasus tindak pidana narkoba	S20	Valid
17	Peta jaringan hasil penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika	S21	Valid
18	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	S22	Valid
19	Berkas perkara penyidikan TPPU hasil TP narkotika	S23	Valid
20	Tersangka TPPU hasil TP narkotika	S24	Valid
21	Nilai aset TPPU narkotika	S25	Valid
22	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	S26	Tidak valid
23	Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	D29	Valid
24	Penyebarluasan informasi P4GN	D31	Valid
25	Jumlah kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi (Media Cetak, Penyiaran, dan Online)	D32	Valid
26	Sebaran kegiatan KIE Bidang Informasi	D33	Valid
27	Jumlah jabatan fungsional untuk penyuluh narkoba dan penggerak swadaya masyarakat	D34	Valid
28	Biaya kegiatan KIE	D35	Valid
29	Biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	D36	Valid
30	Jumlah kendaraan yang digunakan untuk penyuluhan P4GN	D37	Tidak valid

NO	INDIKATOR	KODE INDIKATOR	VALID/TIDAK VALID (sig > 0.05)
31	Indeks Kemandirian Masyarakat dalam P4GN (Instrumen BNN)	D38	Valid
32	Institusi / lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	D39	Valid
33	Kegiatan Bidang Advokasi	D40	Valid
34	Peserta kegiatan KIE Bidang Advokasi	D41	Valid
35	Peserta kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh BNNP	D42	Valid
36	Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	D43	Valid
37	Penggiat anti narkoba	D44	Valid
38	Relawan anti narkoba	D45	Valid
39	Indeks Keterpulihan Daerah Rawan (Instrumen Indeks Keterpulihan BNN)	D46	Tidak valid
40	Prevalensi Pernah Pakai Narkoba	D47	Valid
41	Prevalensi Setahun Pakai Narkoba	D48	Valid
42	Titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif	D50	Valid
43	Jumlah peserta kegiatan program pelatihan pemberdayaan alternatif	D51	Valid
44	Titik kawasan rawan narkoba	D52	Valid
45	Indeks Layanan Rehab Berkelanjutan (Instrumen Kapabilitas Rehabilitasi- <i>On Process</i>)	D53	Tidak valid
46	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi (Instrumen Mutu Layanan BNSP)	D54	Valid
47	Angka Kualitas Hidup Klien Rehabilitasi (Instrumen WHO QoL)	D55	Tidak valid
48	Penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah (BNNP)	D57	Valid
49	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi instansi pemerintah	D58a	Valid
50	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi komponen masyarakat	D58b	Valid
51	Jumlah fasilitas rehabilitasi yang ada keterlibatan BNN dalam pengelolaannya	D59	Valid
52	Jumlah fasilitas rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN	D60	Valid
53	Jumlah klien rehabilitasi rawat jalan & rawat inap di fasilitas rehabilitasi BNN (BNNP, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi)	D61	Valid
54	Fasilitas layanan pascarehabilitasi	D62	Valid
55	Klien layanan pascarehabilitasi	D63	Valid

Lampiran 3. Tabel Pengolahan Data Indeks

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
Supply Reduction	Pengu-rangan Produksi	Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan dibagi jumlah provinsi	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi di Indonesia	0,5	0,00	1,00	Jika mendekati 0 maka diasumsikan setiap provinsi memiliki 1 titik lokasi
		Luas lahan tanaman ganja dimusnahkan	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi di Indonesia	0,0000003	0,00	1,00	Nilai mendekati 0 maka luas lahan semakin ditutupi luas lahan tanaman ganja. Angka 0 berarti buruk
		Penyelidikan lokasi lahan tanaman narkotika	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi di Indonesia	0,5	0,00	1,00	
		Aparat bertugas pemberantasan narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah petugas kabupaten (5)	0,45	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 petugas
		Persentase realisasi anggaran	Angka indikator nasional dibagi 100	0,95	0,00	1,00	
		Senjata untuk aparat pemberantasan narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/ kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah senjata (5)	0,54	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 senjata
		Kasus yang diterima rutan BNN	Angka indikator nasional kasus yang diterima rutan BNN dibagi angka indikator nasional tersangka yang diterima BNN	0,65	0,00	1,00	Jika jumlah kasus sama dengan jumlah tersangka, berarti satu kasus hanya satu tersangka, artinya tidak banyak yang narkoba -> nilai 1

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
		Tersangka yang diterima rutan BNN	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi dibagi 100	0,43	0,00	1,00	Persentase terhadap provinsi
Supply Reduction	Pemutusan Distribusi	Berkas Perkara Kasus Peredaran Narkotika	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi rata-rata berkas perkara (5)	0,49	0,00	1,00	Rata-rata berkas perkara provinsi per 5 kejadian
		Barang Bukti Narkotika	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi rata-rata maksimum barang bukti per kasus (25000 gr)	0,46	0,00	1,00	Asumsi rata-rata maksimum barang bukti per kasus adalah 25000 gr
		Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi kasus per kabupaten (3)	0,62	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 3 kasus
		Tersangka kasus tindak pidana narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi tersangka per kabupaten (6)	0,49	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 6 tersangka
		Peta jaringan hasil penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia	0,19	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 1 jaringan
		Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi dibagi 100 (nilai tertinggi adalah 100)	1,00	0,00	1,00	

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
Supply Reduction	Perampasan Aset	Berkas Perkara Penyidikan TPPU Hasil TP Narkotika	Angka nasional dibagi 514 (jumlah kabupaten/kota)	0,09	0,00	1,00	Asumsi maksimum dalam 1 tahun ada 100 berkas perkara
		Tersangka TPPU Hasil TP Narkotika	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi maksimum jumlah tersangka per kasus (2)	0,04	0,00	1,00	Asumsi maksimum jumlah tersangka per kasus adalah 2 tersangka
		Nilai Aset TPPU Narkotika	Angka indikator nasional nilai aset TPPU Narkotika dibagi dengan angka indikator nasional tersangka TPPU Hasil TP Narkotika, dibagi 10 triliun	0,30	0,00	1,00	per 10 triliun
Demand Reduction	Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal	Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Angka indikator nasional dibagi 100	0,51	0,00	1,00	
		Penyebarluasan informasi P4GN	Angka indikator nasional dibagi target informasi per provinsi (100)	0,36	0,00	1,00	Target 100 informasi per provinsi
		Jumlah kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi (Media Cetak, Penyiaran, dan Online)	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi kapasitas per kabupaten (30)	0,57	0,00	1,00	Asumsi kapasitas per kabupaten 30
		Sebaran kegiatan KIE Bidang Informasi	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi sebaran per kabupaten (50.000)	0,52	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 50.000 sebaran

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
		Jumlah jabatan fungsional untuk penyuluh narkoba dan penggerak swadaya masyarakat	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi per kabupaten (2)	0,33	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten 2
		Biaya kegiatan KIE	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi biaya kegiatan per kabupaten (200 juta)	0,47	0,00	1,00	Asumsi biaya kegiatan per kabupaten 200 juta
		Biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi biaya per kegiatan per kabupaten (100 juta)	0,88	0,00	1,00	Biaya per kegiatan per kabupaten 100 juta
Demand Reduction	Penguatan Ketahanan Komunal	Indeks Kemandirian Masyarakat dalam P4GN (Instrumen BNN)	Angka indikator nasional dibagi 5	0,62	0,00	1,00	Skala 1 - 5
		Institusi / lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah institusi / lembaga (10)	0,41	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 10 institusi/ lembaga
		Kegiatan Bidang Advokasi	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi kegiatan per kabupaten (50)	0,48	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 50 kegiatan advokasi
		Peserta kegiatan KIE Bidang Advokasi	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah peserta (10.000)	0,32	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 10.000 peserta

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
		Peserta kegiatan tes urine yang dilaksanakan oleh BNNP	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah peserta tes urine (1000)	0,62	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 1.000 peserta
		Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi petugas per kabupaten (10)	0,71	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 10 petugas
		Penggiat anti narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi jumlah penduduk (100.000)	0,39	0,00	1,00	per 100 ribu penduduk
		Relawan anti narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi jumlah penduduk (100.000)	0,07	0,00	1,00	per 100 ribu penduduk
Demand Reduction	Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba	Prevalensi Pernah Pakai Narkoba	1 dikurang angka indikator nasional dibagi 100	0,98	0,00	1,00	Sentimen negatif, jadi
		Prevalensi Setahun Pakai Narkoba	1 dikurang angka indikator nasional dibagi 100	0,98	0,00	1,00	Sentimen negatif, jadi
		Titik kawasan narkoba yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternatif	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia	0,12	0,00	1,00	per 100 titik
		Jumlah peserta kegiatan program pelatihan pemberdayaan alternatif	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah peserta (5)	0,52	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 peserta

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
		Titik kawasan rawan narkoba	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi titik per kabupaten ada (5)	0,25	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 titik
<i>Demand Reduction</i>	Penguatan Program Rehabilitasi	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi (Instrumen Mutu Layanan BNSP)	Angka indikator nasional dibagi 10 (nilai tertinggi skala)	0,46	0,00	1,00	Skala 1-10
		Penilaian standar pelayanan minimal pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah (BNNP)	Angka indikator nasional dibagi 100	0,78	0,00	1,00	
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi instansi pemerintah	Angka indikator nasional dibagi 100	0,86	0,00	1,00	
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi komponen masyarakat	Angka indikator nasional dibagi 100	0,76	0,00	1,00	
		Jumlah fasilitas rehabilitasi yang ada keterlibatan BNN dalam pengelolaannya	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah fasilitas per kabupaten (5)	0,29	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 fasilitas
		Jumlah fasilitas rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah fasilitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN per kabupaten (2)	0,93	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 2 fasilitas

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	RUMUS NILAI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR	MIN	MAX	KET
		Jumlah klien rehabilitasi rawat jalan & rawat inap di fasilitas rehabilitasi BNN (BNNP, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi)	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi jumlah klien rawat jalan dan rawat inap per kabupaten (50)	0,58	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 50 klien
		Fasilitas layanan pascarehabilitasi	Angka indikator nasional dibagi jumlah provinsi di Indonesia, dibagi asumsi fasilitas layanan pascarehabilitasi per kabupaten (2)	0,79	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 2 fasilitas
		Klien layanan pascarehabilitasi	Angka indikator nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia, dibagi asumsi klien layanan pasca rehabilitasi per kabupaten (5)	0,92	0,00	1,00	Asumsi per kabupaten ada 5 klien

Lampiran 4. Tabel Perhitungan Indeks

Dimensi	Jumlah	Total Nilai Normalisasi	Average atau 50-50	Proporsional terhadap Indikator	Hasil FGD 38-62
<i>Supply Reduction</i>	17	7,692823853	0,45251905	0,395455536	0,171957239
Pengurangan Produksi	8	4,015117479		0,501889685	
Pemutusan Distribusi	6	3,248551203		0,5414252	
Perampasan Aset	3	0,429155172		0,143051724	
<i>Demand Reduction</i>	29	17,0875449	0,589225686	0,581580694	0,365319925
Penguatan Ketahanan (Imunitas) Personal	7	3,645672368		0,520810338	
Penguatan Ketahanan Komunal (Masyarakat)	8	4,215540039		0,526942505	
Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba	5	2,850996109		0,570199222	
Penguatan Program Rehabilitasi	9	6,375336384		0,708370709	

Buku Kajian Penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berisi tentang hasil kajian yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta pada tahun 2020. Pengukuran Indeks P4GN ini menggunakan pendekatan pada dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai penyusun Indeks P4GN sudah cukup mewakili dimensi *supply reduction* dan *demand reduction* karena sudah memuat aspek perspektif (*input*, proses, dan *output*) dan bidang kegiatan (pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi). Berdasarkan hasil penghitungan dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa Indeks P4GN pada tahun 2020 tergolong dalam klasifikasi “Cukup Efektif”.

Melalui hasil kajian ini, BNN dan *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami gambaran pemetaan hasil capaian program dan kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, penulis berharap agar hasil kajian ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan atau penyempurnaan kebijakan program dan kegiatan P4GN menjadi lebih efektif dan efisien, baik untuk saat ini maupun masa mendatang.



**PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(PUSLITDATIN BNN)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Website: www.bnn.go.id

Email : puslitdatin@bnn.go.id.

Call Center : 184

SMS Center: 081221675675

INDEKS P4GN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 2020

Buku Kajian Penyusunan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berisi tentang hasil kajian yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS Jakarta pada tahun 2020. Pengukuran Indeks P4GN ini menggunakan pendekatan pada dimensi *supply reduction* dan *demand reduction*. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai penyusun Indeks P4GN sudah cukup mewakili dimensi *supply reduction* dan *demand reduction* karena sudah memuat aspek perspektif (input, proses, dan output) dan bidang kegiatan (pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi). Berdasarkan hasil penghitungan dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa Indeks P4GN pada tahun 2020 tergolong dalam klasifikasi “Cukup Efektif”.

Melalui hasil kajian ini, BNN dan *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami gambaran pemetaan hasil capaian program dan kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, penulis berharap agar hasil kajian ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan atau penyempurnaan kebijakan program dan kegiatan P4GN menjadi lebih efektif dan efisien, baik untuk saat ini maupun masa mendatang.



**Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)**

Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Website : www.bnn.go.id

Email : puslitdatin@bnn.go.id

Call Center : 184

SMS Center : 081 221 675 675

ISBN 978-623-93775-3-3



9 786239 377533